



LAPORAN KINERJA

LKj

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017



Pemerintah Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018

Pernyataan Telah Direviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bantul.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Bantul, 22 Maret 2018

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul


HERMAWAN SETIAJI, S.I.P., MH
NIP. 19740322 199311 1 001

Kata Pengantar



Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2017

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul yang Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis.

Tahun 2017 bagi Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021. RPJMD tersebut sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah tentang

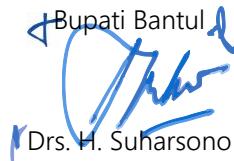
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran pemerintahan tahun 2017 di Kabupaten Bantul telah banyak membawa hasil. Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama terdapat 2 (dua) indikator yang berkriteria Tinggi, bahkan terdapat 15 (lima belas) indikator yang memenuhi kriteria Sangat Tinggi. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah *outcome* yang masuk kriteria Tinggi dan Sangat Tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan.

Namun kami sadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Untuk itu laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan lebih akuntabel, meningkatkan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, melaksanakan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan menegakkan hukum baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2017, khususnya Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB serta Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, 23 Maret 2018


Bupati Bantul
Drs. H. Suharsono

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2017 berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Dalam perjalanan pembangunan jangka menengah yang pada tahun 2017

merupakan tahun kedua. Perubahan RPJMD dilaksanakan karena adanya perubahan Perangkat Daerah, sehingga perlu adanya penyesuaian berdasarkan masing-masing tupoksi Perangkat Daerah yang baru.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan tahun 2017, sesuai dengan RPJMD. Dalam menetapkan IKU tersebut mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 19 indikator kinerja utama Bupati tahun 2017, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator sasaran atau sebanyak 78,95% dalam kriteria Sangat Tinggi, bahkan 12 (dua belas) IKU diantaranya realisasi mencapai lebih dari 100%. Sedangkan 2 (dua) IKU atau 10,53% masuk dalam kriteria Tinggi, 1 (satu) IKU atau 5,26% masuk dalam kriteria Sedang. dan 1 (satu) IKU atau 5,26% masuk dalam kriteria Sangat Rendah.

IKU yang masuk kriteria Sangat Tinggi, yaitu indikator yang pencapaiannya $\geq 90,1\%$ meliputi : *Indonesia Governance Index (IGI)*, Umur Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Kemiskinan, Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, Cakupan industri kreatif, Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, kuda, unggas), Pertumbuhan produksi tanaman pangan, Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura, Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan, Pertumbuhan produksi perikanan, Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Desa Tangguh Bencana dan Indeks Pembangunan Kebudayaan

Selanjutnya IKU yang mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 12 (dua belas) IKU, mencakup : *Indonesia Governance Index (IGI)*, Umur Harapan Hidup, Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, Cakupan industri kreatif, Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, kuda, unggas), Pertumbuhan produksi tanaman pangan, Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura, Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan, Pertumbuhan produksi perikanan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Desa Tangguh Bencana dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

IKU yang masuk kriteria Tinggi yaitu Pertumbuhan ekonomi dan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, IKU yang masuk kriteria Sedang yaitu Pemerataan

Pendapatan, Sedangkan IKU yang masuk kriteria Sangat Rendah yaitu Angka Kriminalitas dari target yang ditetapkan. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan dari setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bantul ke depan. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan berbagai unsur baik Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY, daerah lain maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah.

Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja , hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh OPD di lingkungan Kabupaten Bantul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, utamanya dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu	iii
Kata Pengantar	v
Ikhtisar Eksekutif.....	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Demografi.....	2
1. Jumlah Penduduk	2
2. Indeks Pembangunan Manusia.....	4
3. Penduduk Miskin	5
C. Kondisi Ekonomi Daerah.....	6
D. Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Bantul	8
E. Isu Strategis	10
Bab II Perencanaan Kinerja	13
A. Rencana Strategis	13

1.	Visi dan Misi.....	13
2.	Tujuan dan Sasaran.....	15
3.	Strategi, Arah Kebijakan dan Program	19
4.	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah.....	22
B.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017	25
C.	Program untuk Pencapaian Sasaran.....	27
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	29
A.	Capaian Kinerja Kinerja Utama 2017	30
B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	33
1.	Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas.....	33
2.	Sasaran Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi.....	40
3.	Sasaran Terwujudnya Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas	57
4.	Sasaran Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu ...	62
5.	Sasaran Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas	68
6.	Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul	74
7.	Sasaran Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas	79
8.	Sasaran Terpenuhinya Ketahanan Pangan Masyarakat ...	81
9.	Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat	92
10.	Sasaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat.....	96
11.	Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	101
12.	Sasaran Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	106
13.	Sasaran Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Lahan...	112

14.	Sasaran Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.....	116
15.	Sasaran Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	120
C.	Akuntabilitas Anggaran.....	125
D.	Efisiensi Sumber Daya.....	132
Bab IV	Penutup.....	135
Lampiran I	Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Bantul Tahun 2017	137
Lampiran II	Struktur Pemerintah Kabupaten Bantul	138

Daftar Tabel

Tabel I.1	Pertumbuhan PDRB (Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010)Tahun 2016-2017	6
Tabel I.2	Perkembangan PDRB Per Kapita (Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010) Tahun 2016-2017	7
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	15
Tabel II.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	18
Tabel II.3	Strategi dan Arah Kebijakan	19
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017.....	25
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017	27
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	30
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.....	30
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	33
Tabel III.4	Hasil Pengukuran Arena Indikator IGI	34
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi.....	40
Tabel III.6	Inovasi Pelayanan Masyarakat.....	42
Tabel III.7	Hasil Penilaian Akreditasi Puskesmas Tahun 2015-2017.....	46
Tabel III.8	Jumlah Dokter Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017.....	47

Tabel III.9	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2014 – 2017	48
Tabel III.10	Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2016 - 2017	49
Tabel III.11	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas	58
Tabel III.12	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	63
Tabel III.13	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas.....	69
Tabel III.14	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul.....	75
Tabel III.15	Objek Wisata Kabupaten Bantul Tahun 2013- 2017	75
Tabel III.16	Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Tahun 2011 – 2017	77
Tabel III.17	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas	79
Tabel III.18	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Ketahanan Pangan Masyarakat.....	82
Tabel III.19	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2015-2017	84
Tabel III.20	Produksi Benih Padi UPT BBP Tahun 2017	85
Tabel III.21	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Tahun 2015-2017	88
Tabel III.22	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2016-2017	90
Tabel III.23	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat	93
Tabel III.24	Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan Tahun 2015 – 2017	93
Tabel III.25	Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2015-2017.....	94

Tabel III.26	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat.....	96
Tabel III.27	Nilai Indeks Pelayanan Infrastruktur Gabungan.....	97
Tabel III.28	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas.....	101
Tabel III.29	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	107
Tabel III.30	Potensi Bencana di Kabupaten Bantul	108
Tabel III.31	Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bantul	108
Tabel III.32	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Lahan	113
Tabel III.33	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul.....	113
Tabel III.34	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.....	117
Tabel III.35	Angka Kriminalitas Tahun 2017	117
Tabel III.36	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.....	121
Tabel III.37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2017.....	121
Tabel III.38	Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017*	125
Tabel III.39	Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	126
Tabel III.40	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2016	126
Tabel III.41	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	129
Tabel III.42	Distribusi Realisasi Anggaran Pendukung IKU Tahun 2017	132
Tabel III.43	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017	133

Daftar Gambar

Gambar I.1	Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2017 ...	3
Gambar I.2	Kepadatan Penduduk Geografis Kabupaten Bantul Tahun 2016	3
Gambar I.3	Perkembangan IPM Tahun 2010 – 2016.....	4
Gambar I.4	IPM Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2016.....	5
Gambar I.5	<i>Trend</i> Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013 – 2017	5
Gambar I.6	Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2013 – 2017	8
Gambar I.7	PNS Menurut Pendidikan.....	9
Gambar I.8	Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin	9
Gambar I.9	Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2017	10
Gambar III.1	Pencapaian IKU Bupati Tahun 2017.....	32
Gambar III.2	Bupati Bantul, Bapak Drs. H. Suharsono dalam Penerimaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.....	35
Gambar III.3	SITUPAT (Siji Entuk Papat), Sekali Pengajuan Mendapatkan NIK, KK, Akta Kelahiran, dan KIA dalam Waktu 30 menit.....	36
Gambar III.4	Perkembangan Umur Harapan Hidup Tahun 2012 - 2016	41
Gambar III.5	UHH Kabupaten/Kota di Wilayah DIY Tahun 2014 – 2016.....	42

Gambar III.6	Kampanye Germas untuk Guru TK, SD, SMP dan SMA se Kabupaten Bantul Tahun 2017	44
Gambar III.7	Bapak Wakil Bupati menerima Piagam dan Piala Swasti Saba Wistara Kabupaten Sehat.....	45
Gambar III.8	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu di Provinsi DIY Tahun 2011 – 2016.....	50
Gambar III.9	Angka Status Gizi Buruk Bantul dan DIY Tahun 2012 – 2017.....	52
Gambar III.10	Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB di Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2017	53
Gambar III.11	<i>Trend</i> Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2014 - 2016.....	58
Gambar III.12	Penyerahan Piala Kehuaraan OSN Tahun 2017	59
Gambar III.13	Simulasi Pelaksanaan UNBK	60
Gambar III.14	Gebyar Penganugerahan Ki Hajar Dewantara SD 1 Bantul	61
Gambar III.15	<i>Trend</i> Angka Kemiskinan Tahun 2013 – 2017	63
Gambar III.16	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013 -2017	64
Gambar III.17	Jumlah Jiwa Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2017	64
Gambar III.18	Kipas Bambu Jipangan Salah Satu PAS	66
Gambar III.19	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2013 – 2017.....	70
Gambar III.20	Kerajinan, salah satu Pendongkrak Pertumbuhan Ekonomi	71
Gambar III.21	Perkembangan Indeks Gini Tahun 2013 – 2017	72
Gambar III.22	<i>Fashion Street</i> di Srandakan	76
Gambar III.23	Gejog Lesung di Desa Wisata Kaki Langit.....	78
Gambar III.24	Batik Kayu Krebet.....	80
Gambar III.25	Launching Inseminasi Buatan oleh Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bupati Bantul Dalam Rangka Gebyar Upsus Siwab.....	83
Gambar III.26	Sekretaris Daerah, Drs. Riyantono, M.Si melakukan Penanaman Padi melalui Tanam Jajar Legowo (Tajarwo) Super dalam Gerakan Tanam Padi di Bantul	86

Gambar III.27	Inovasi SIPERKASA pada Pameran Inovasi di Lembaga Administrasi Negara.....	87
Gambar III.28	Festival Pisang dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi Hortikultura.....	89
Gambar III.29	Pasar Tani Kabupaten Bantul Dukung Pemasaran dan Promosi Produk Pertanian	91
Gambar III.30	Penyerahan Bantuan Kapal secara Simbolis oleh Direktur Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	94
Gambar III.31	Wajah Baru Kawasan Jalan Jend. Sudirman.....	98
Gambar III.32	Bersih-bersih Sungai dalam rangka mewujudkan Bantul Bersih Sampah Tahun 2019	102
Gambar III.33	Bapak Wakil Bupati, Abdul Halim Muslih memimpin Gerakan Gropyok Sampah di Sepanjang Pantai Selatan Bantul	103
Gambar III.34	Sawah Sukorame Mangunan Dlingo sebagai Wisata Sawah yang Asri	104
Gambar III.35	Tindakan Evakuasi Korban Bencana.....	110
Gambar III.36	Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2017	114
Gambar III.37	Persiapan Pelaksanaan Operasi Gabungan.....	119
Gambar III.38	Tradisi membagi Lemper Raksasa dalam Rebo Pungkasan	122

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Kabupaten Bantul disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan

Bab I Pendahuluan berisi :

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Demografi
- C. Kondisi Ekonomi Daerah
- D. Keragaman SDM
Pemerintah Kabupaten Bantul
- E. Isu Strategis

capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

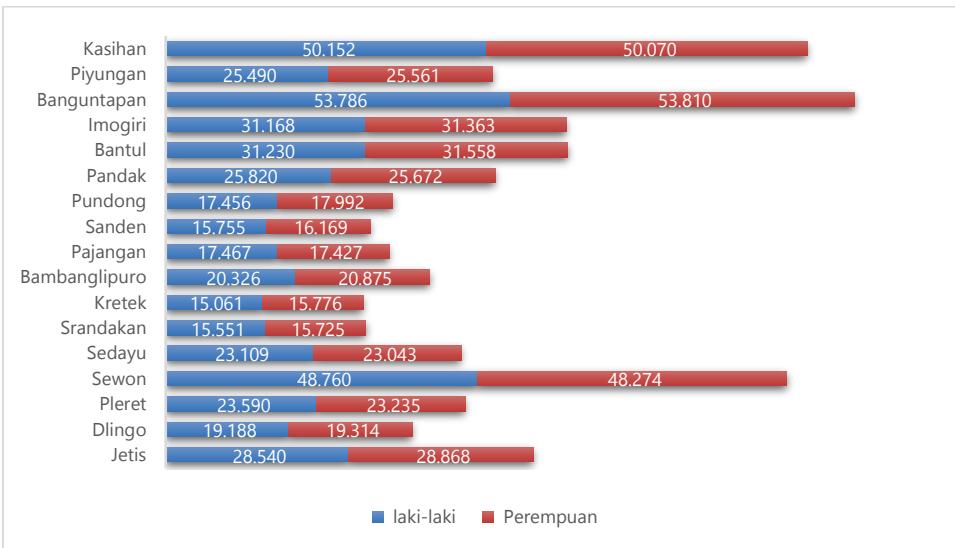
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Gambaran Umum Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebanyak 928.676 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 464.860 jiwa atau sebanyak 50,04% dan perempuan sebanyak 463.816 jiwa atau sebanyak 49,96%. Kecamatan Banguntapan merupakan kecamatan yang berpenduduk terbanyak, yaitu 107.596 jiwa atau sebesar 11,60%, sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Kretek paling sedikit, yaitu 30.837 jiwa atau sebesar 3,33%.

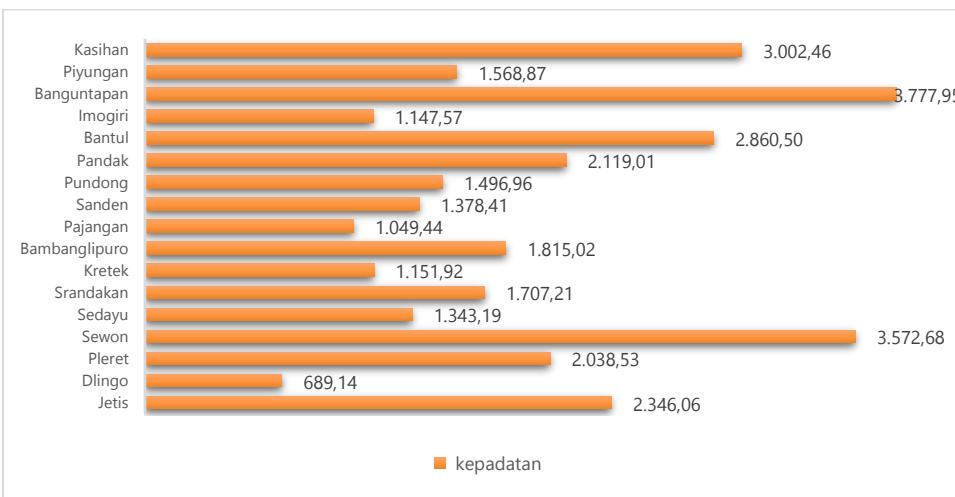
Guna melakukan kebijakan yang berprespektif *gender* maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan sebagai berikut :



Sumber : Dinas Dukcapil, 2018

Gambar I.1 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2017

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah.



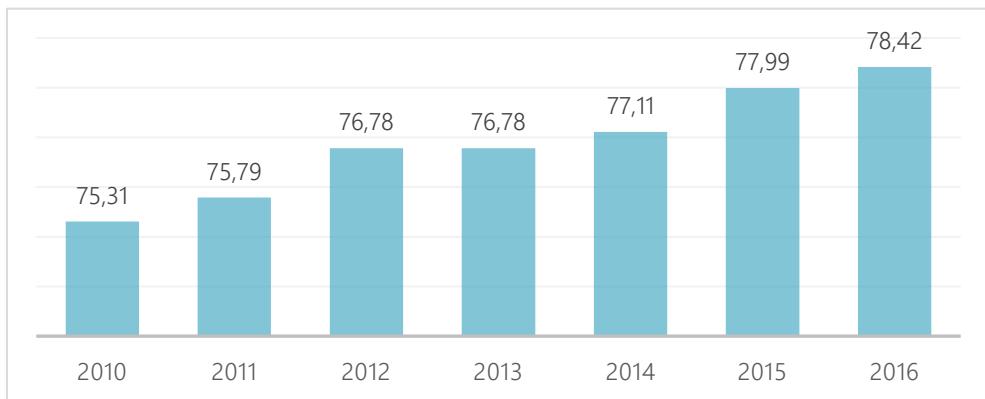
Sumber : Dinas Dukcapil, 2018

Gambar I.2 Kepadatan Penduduk Geografis Kabupaten Bantul Tahun 2016

2. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam konsep pembangunan manusia, manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan alat pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menalarkan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Program – UNDP*). Untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selama beberapa tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif yaitu nilai IPM yang terus mengalami peningkatan yakni sebesar 75,31 pada tahun 2010 hingga 78,42 pada tahun 2016.

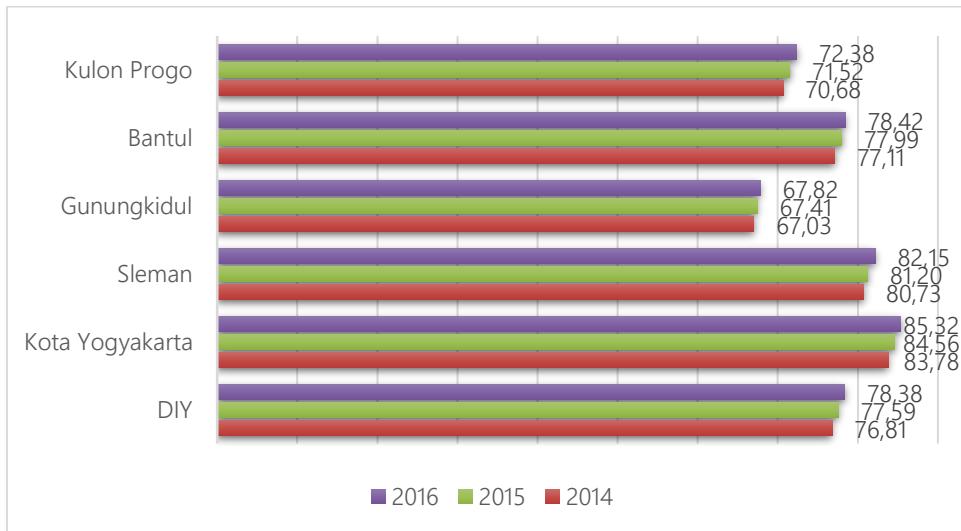


Sumber : BPS, 2017

Gambar I.3 Perkembangan IPM Tahun 2010 – 2016

Capaian level IPM Kabupaten Bantul juga termasuk dalam kelompok 40 besar daerah dengan IPM tertinggi di Indonesia. Nilai IPM Bantul pada tahun 2016 mencapai 78,42 dan berada dalam kategori IPM tinggi. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 75,31. Komponen yang memiliki andil terbesar terhadap IPM Kabupaten Bantul adalah indikator angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2016 lebih tinggi dari DIY (78,38) dan Nasional (70,02).

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di DIY, Bantul menempati urutan ketiga setelah Kota Yogyakarta (85,32) dan Sleman (82,15).

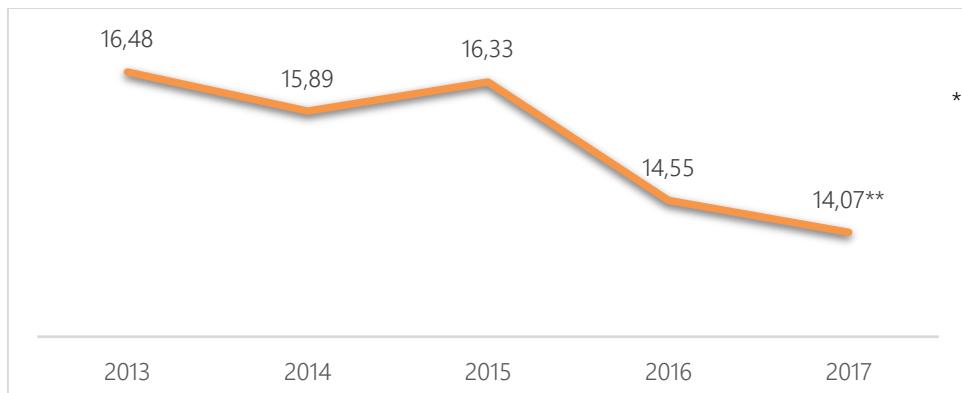


Sumber : BPS, 2017

Gambar I.4 IPM Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2016

3. Penduduk Miskin

Dengan menggunakan dasar penghitungan sementara proyeksi dari BPS maka diperoleh persentase tingkat kemiskinan tahun 2017 sebesar 14,07%, lebih rendah dari tahun 2016 yaitu sebesar 14,55%.



Sumber : BPS, 2018

**) angka sangat sementara

Gambar I.5 Trend Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013 – 2017

C. Kondisi Ekonomi Daerah

Peningkatan nilai tambah dari suatu proses kegiatan ekonomi menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan makin berkembangnya aktifitas perekonomian baik aktifitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah tersebut yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan pada *System of National Account* (SNA) tahun 2008, pada tahun 2017 penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 menggantikan tahun dasar 2000. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2017 (angka sangat sementara) sebesar 4,52% atau mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2016 yang mampu tumbuh sebesar 5,06%. Hal ini disebabkan oleh melambatnya beberapa kegiatan sektor ekonomi, utamanya kegiatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan produksi pada tanaman bahan makanan yang meliputi padi dan palawija. Perlambatan yang dialami pada sektor pertanian, lebih disebabkan oleh cuaca terutama intesitas hujan yang meningkat diakhir tahun, sehingga pertanian mengalami gagal panen karena banjir. Sektor industri pengolahan mengalami perlambatan pada kegiatan industri mikro dan kecil, hal ini disebabkan peningkatan produksi tidak setinggi tahun sebelumnya.

Tabel I.1 Pertumbuhan PDRB (Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan
Tahun 2010) Tahun 2016-2017

No.	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan tahun 2000	
		Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2016	20.924.970	8,28	16.377.984	5,06
2	2017**)	22.816.226	9,04	17.117.854	4,52

Sumber : BPS, 2018

**) angka sangat sementara

Nilai PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 (sangat sementara) mencapai angka 22,816 triliun rupiah. Secara nominal nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 yang mencapai 20,924 triliun rupiah. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi dan laju inflasi yang terkendali.

Nilai PDRB Kabupaten Bantul tahun 2017 atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 17,117 triliun rupiah, mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 yang mencapai 16,377 triliun rupiah. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi seluruh sektor ekonomi dan sudah terbebas dari pengaruh inflasi.

Tabel I.2 Perkembangan PDRB Per Kapita (Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010) Tahun 2016-2017

No	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan
1	2015	19.892	7,93	16.046	3,66
2	2016	21.275	6,95	16.653	3,78
3	2017**	22.925	7,76	17.199	3,28

Sumber : BPS, 2018

**) angka sangat sementara

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bantul atas dasar berlaku sejak tahun 2015-2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp21.275 ribu. Secara nominal mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi Rp22.925 ribu.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.



Sumber : Bappeda, 2018 (data diolah)

Gambar I.6 Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2013 – 2017

Sektor primer mengalami penurunan kontribusi dari 16% pada tahun 2013 menjadi 13,16% pada tahun 2017. Sektor sekunder mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu besar, dari 24,99% pada tahun 2013 menjadi 25,00% pada tahun 2017. Sementara sektor tersier sebagai sektor yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Bantul, meningkat dari 58,99% pada tahun 2013 menjadi 61,84% pada tahun 2017.

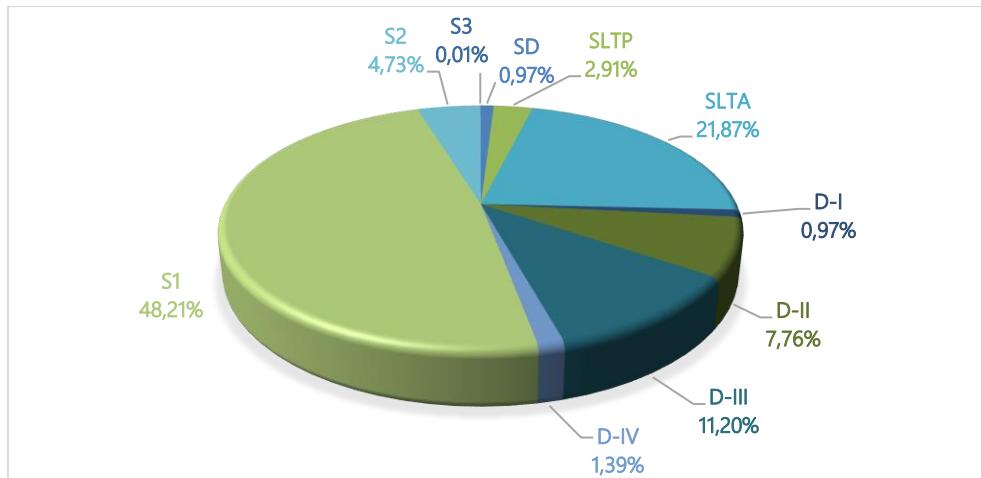
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam rentang lima tahun pembangunan perekonomian di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif, khususnya pada sektor tersier. Penurunan peran sektor primer bisa diimbangi dengan peningkatan sektor sekunder dan tersier.

D. Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Bantul per 31 Desember 2017 sebanyak 8.584 orang, terdiri dari 3.658 orang atau 42,61% Laki-laki dan 4.926 orang atau 57,39% Perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang baik.

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Bantul didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 48,21% atau 4.138 orang, disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak

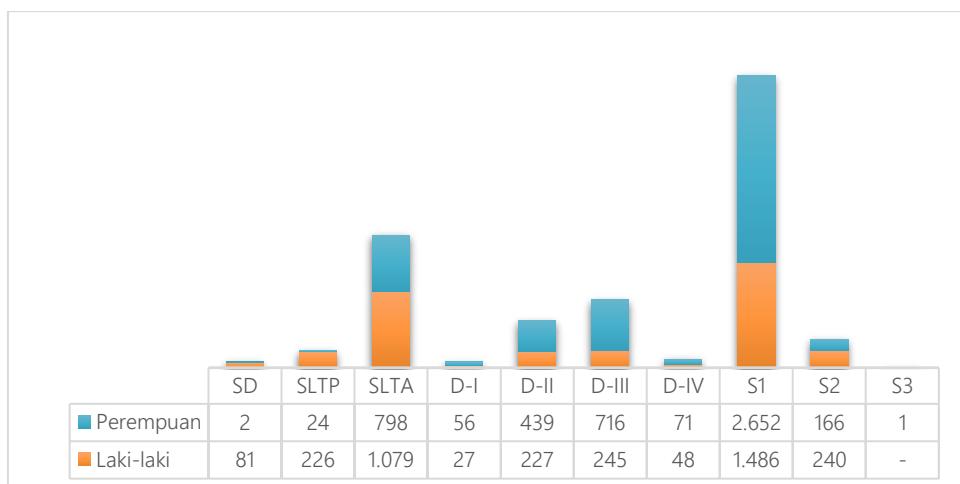
21,87% atau 1.877 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Bantul cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : BKD, 2018

Gambar I.7 PNS Menurut Pendidikan

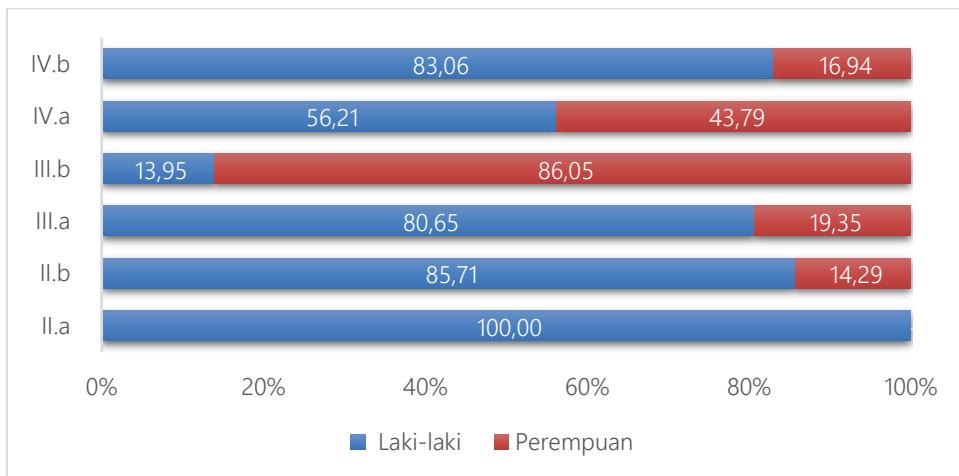
Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari D1 hingga S1, perimbangan gender nya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SMA, SMP dan SD).



Sumber : BKPP, 2018

Gambar I.8 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.



Sumber : BKD, 2018

Gambar I.9 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2017

E. Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Bantul 2016-2021, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang antara lain meliputi kesehatan, pendidikan dan rohani.
2. Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal.
3. Pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing.
4. Mendorong sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu unggulan daerah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.
6. Pengembangan sarana dan prasarana dasar dan yang menunjang aktivitas perekonomian.
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
8. Perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial.
9. Pengendalian laju alih fungsi lahan

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah yaitu :

"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

Bab II Perencanaan Kinerja berisi :

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kinerja (PK)
Tahun 2017
- C. Program untuk Pencapaian
Sasaran

4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU. Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dan SKPD dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)					
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Mewujudkan peningkatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terwujudnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	kualitas hidup masyarakat.		masyarakat yang tinggi	
3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka kemiskinan
			Pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi
				Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pemerataan pendapatan
				Terciptanya industri yang berkualitas	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan
				Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Cakupan industri kreatif
					Pertumbuhan produksi tanaman pangan
					Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura
					Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan
					Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
				Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan
4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengeleolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan infrastruktur
				Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana
				Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
5	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas
		Mewujudkan budaya sebaha identitas spesifik daerah	Indeks pembangunan kebudayaan	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks pembangunan kebudayaan

Sumber : RPJMD 2016 – 2021

Sedangkan target Indikator kinerja utama awal tahun RPJMD dengan akhir tahun RPJMD sebagai berikut :

Tabel II.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Awal 2016	Target Akhir 2021
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	57 (cukup)	85 (Sangat Baik)
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,26	73,33
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15	15,9
4	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	Persen	14,41	10,66
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Pemerataan Pendapatan	Persen Angka	5,25 0,3149	5,6 0,3025
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	5	10
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	Persen	25	50
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	0,5	1,0
		Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	0,1005	0,1030
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	1	1,25
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0,1	0,35
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	1,25	1,50
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Mayarakat terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	n/a	80
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	39	72
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Persen	20	33,34
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	80	85
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Persen	0,040	0,027
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	40	90

Sumber : RPJMD 2016 – 2021

3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel II.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel Peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan keualitas SDM birokrasi Mengembangkan layanan birokrasi yang prima Meningkatkan mutu SDM dan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan serta pengelolaan keuangan aset daerah

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan Peningkatan cakupan pangan dan kualitas gizi yang berimbang Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Pembinaan pemasyarakatan olahraga	Meningkatkan sarana prasarana, SDM dan akses serta mutu pelayanan kesehatan Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan secara berkelanjutan Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatkan prestasi olahraga
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Peningkatan daya saing pendidikan	Meningkatkan pencegahan kecelakaan transportasi
		Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam	Meningkatkan mutu pemenuhan standar nasional pendidikan

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		mengembangkan proses belajar mengajar	Meningkatkan model pendidikan berbasis budi pekerti
		Penguatan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak	Meningkatkan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini

Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat	Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha
		Pengurangan beban hidup warga kurang mampu	Meningkatkan kesejahteraan keluarga
		Validasi data warga kurang mampu	Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Peningkatan daya saing produk daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk
		Peningkatan produktivitas masyarakat	Meningkatkan iklim dan kualitas pelayanan investasi
			Meningkatkan konstribusi belanja
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing	Peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata	Mengurangi kesenjangan pendapatan
		Peningkatan kualitas	Meningkatkan usaha produktif masyarakat yang kompetitif
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Akselerasi pengembangan insutri kreatif	Meningkatkan kualitas produk, SDM dan kelembagaan UMKM kreatif
		Akselerasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat	Intensifikasi dan diversifikasi udaha tani
		Pengembangan peternakan berbasis industri	Meningkatkan kualitas sumberdaya peternakan

Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan dasar masyarakat	Peningkatan produksi perikanan	Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan sarana prasarana perikanan

Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan sarana dan prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana
	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.	Percepatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat.
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Pengembangan edukasi kebencanaan	Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan sarana prasarana mitigasi bencana
			Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Misi 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, anam, progresif dan harmobnis serta berbudaya istimewa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan kualitas kehidupan beragama	Mendorong terciptanya situasi kondusif dalam kehidupan beragama
		Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan pemahaman hukum.
	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Peningkatan pemberdayaan budaya daerah secara berkelanjutan	Mengoptimalkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya

Sumber : RPJMD 2016 – 2021

4. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah

Program prioritas daerah periode tahun 2016 – 2021 difokuskan dan mempertimbangkan pada kebijakan umum dan kepentingan, sebagai berikut :

1. Peningkatan bantuan pendidikan

Besaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) direncanakan akan dinaikkan secara bertahap sehingga pada 5 tahun ke depan besaran BOP sudah bisa mendekati *Unit Cost Standar* untuk masing-masing jenjang pendidikan. Pada tahun 2017 untuk jenjang SD/MI direncanakan sudah mencapai 76% dari *Unit Cost Standar*, dengan kebutuhan biaya sebesar Rp.24.938.710.000, sedangkan untuk jenjang SMP/MTS direncanakan sudah mencapai 69% dari *Unit Cost Standar* dengan kebutuhan biaya sebesar Rp.26.195.000.000.

2. Gerakan CSR untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

Potensi CSR yang cukup besar di Kabupaten Bantul dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Melalui kerjasama yang sinergis dengan pihak swasta diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada upaya-upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi lokal., Penyelenggaraan tanggung jawab sosial/*Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur dalam peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2015

3. Total *coverage* Jaminan Kesehatan

Sesuai dengan Road Map Nasional, bahwa pada tahun 2019 semua jenis jaminan kesehatan harus melebur/bertransformasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Bantul juga secara bertahap akan melakukan transformasi kepesertaan Jaminan Kesehatan dari Jamkesda ke BPJS. Tahapan rancangan transformasi jaminan kesehatan akan mulai tahun 2017 s/d tahun 2021.

4. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah dengan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Kondisi alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat dewasa ini, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencari alternatif dan strategi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan di Kabupaten Bantul dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan

5. Pengembangan peternakan modern (antara lain ayam, itik, sapi dan kambing)

Kebutuhan dan konsumsi pangan hewani masyarakat yang selalu meningkat serta keterbatasan pasokan ternak yang disebabkan oleh pengelolaan yang masih tradisional, mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kebijakan pengembangan peternakan modern dengan konsep industri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak siap potong sehingga dapat mencukupi dan pasokan kebutuhan pangan hewani masyarakat serta dapat memberikan kestabilan harga pangan sehingga tetap dapat menjaga daya beli masyarakat.

6. Akselerasi penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, sejak Tahun 2011 terus mengalami penurunan, sehingga terjadi peningkatan persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Dari data BPS terlihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 mencapai 15,2% lebih rendah bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Tahun 2014.

7. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sebagai salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul, pengembangan pariwisata akan tetap menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dikarenakan dampak atau *multiplier effect* nya terhadap akselerasi perekonomian daerah sangat positif, antara lain penyediaan lapangan usaha, pemberdayaan masyarakat, pengembangan wilayah dan pertumbuhan industri pariwisata serta kontribusi dalam bentuk PAD terhadap Pemerintah Daerah. Pengembangan destinasi pariwisata difokuskan pada pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan peningkatan daya tarik serta pelayanan pariwisata

8. Pengembangan Kawasan Budaya

Kabupaten Bantul sebagai salah satu destinasi wisata penting di DIY, khususnya jenis wisata budaya maka penyelenggaraan urusan kebudayaan diarahkan untuk melestarikan kebudayaan daerah melalui kebijakan yang berlandaskan prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aset seni budaya masyarakat, warisan budaya, dan Cagar Budaya (CB) guna menunjang predikat sebagai destinasi wisata budaya.

9. Pengembangan Kawasan Strategis terkait dengan Investasi

Investasi merupakan salah satu stimulus dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini yang mendasari pemerintah Kabupaten Bantul melakukan percepatan pembangunan kawasan strategis investasi yang meliputi Kawasan Industri dan Kawasan Pariwisata. Melalui pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

10. Pengembangan Perikanan

Perikanan merupakan sektor penting dalam pembangunan karena mempunyai peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan sebagai penyedia pangan khususnya sumber protein. Potensi perikanan di Kabupaten Bantul cukup tinggi mencakup perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sektor perikanan tidak hanya menggerakkan sektor perikanan saja, namun juga mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*).

11. Pengembangan Industri Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bantul memiliki industri kreatif yang beraneka ragam, sehingga menjadi kekuatan dan peluang dalam menghadapi persaingan dunia usaha semakin tinggi. Pemerintah Kabupaten Bantul akan mendorong pengembangan industri kreatif daerah secara lebih optimal guna meningkatkan daya saing daerah baik pada level nasional maupun internasional

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Uraian prioritas pembangunan daerah kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2017 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2016 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2017, IKU dan APBD. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	65 (baik)
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,28 tahun
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,2 tahun
4	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	13,66%
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	5,3%
		Pemerataan Pendapatan	0,3121
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	6%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	30%
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	0,6%
		Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1010%
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	1,025%
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,15%
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,30%
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Infrastruktur	72
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	45
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	22,66%
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	81%
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,038
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, 2018

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	47
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	24
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	8
4	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	18
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	14
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	3
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	5
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	8
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	3
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	16
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	5
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	2
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	3
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	13
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	2

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, 2018, data diolah

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Bab III
Akuntabilitas Kinerja berisi :

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- C. Pencapaian Kinerja Lainnya
- D. Akuntabilitas Anggaran
- E. Efisiensi Sumber Daya

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

A. Capaian Kinerja Kinerja Utama 2017

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indonesia Governance Index (IGI)	Angka	62,9	65	75	115,38	85	88,24
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,47	73,28	73,47*	100,26	73,33	100,19
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,73	15,2	14,73*	96,91	15,9	92,64
4	Angka Kemiskinan	Persen	14,55	13,66	14,07**	97,00	10,66	131,99
5	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,06	5,3	4,52	85,28	5,6	80,71
6	Pemerataan Pendapatan	Angka	0,3967	0,3121	0,4126	67,80	0,3025	63,60

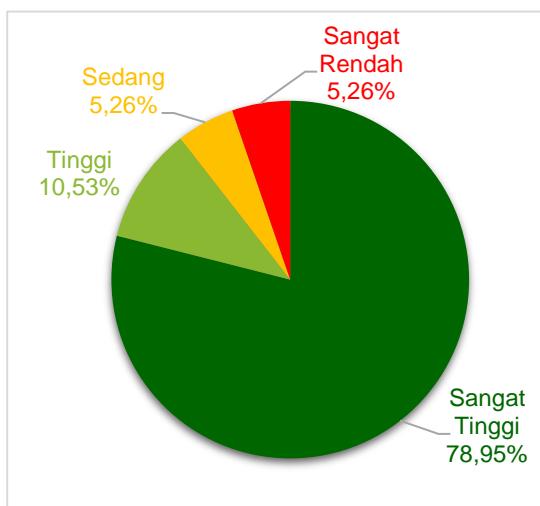
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
7	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	15	6	32,51	541,83	10	325,1
8	Cakupan Industri Kreatif	Persen	39,95	30	41,11	137,03	50	82,22
9	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	4,24	0,6	20,52	3.420,00	1	2052,00
10	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	0,074	0,1010	0,1133	112,18	0,103	110,00
11	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	14,09	1,025	36,974	3.607,22	1,125	3.286,58
12	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0,054	0,15	0,166	110,67	0,35	47,43
13	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	0,697	1,30	5,92	455,38	1,5	394,67
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Angka	-	72	71,57	99,40	80	89,46
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	47,35	45	45,1	100,22	72	62,64
16	Desa Tangguh Bencana	Persen	20	22,66	29,33	129,45	33,34	87,98
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	70,12	81	70,24	86,72	85	82,64
18	Angka Kriminalitas	Angka	0,061	0,038	0,074	5,26	0,027	-74,07

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54,80	50	57,01	114,02	90	63,34

Sumber : Bagian Admistrasi Pembangunan, 2018, data diolah,

*) angka sementara, **) angka sangat sementara

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 19 indikator kinerja utama Bupati tahun 2017, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator sasaran atau sebanyak 78,95% dalam kriteria Sangat Tinggi, bahkan 12 (dua belas) IKU diantaranya realisasi mencapai lebih dari 100%. Sedangkan 2 (dua) IKU atau 10,53% masuk dalam kriteria Tinggi, 1 (satu) IKU atau 5,26% masuk dalam kriteria Sedang. dan 1 (satu) IKU atau 5,26% masuk dalam kriteria Sangat Rendah.



Gambar III.1 Pencapaian IKU Bupati Tahun 2017

IKU yang masuk kriteria Sangat Tinggi dari target yang ditetapkan yaitu *Indonesia Governance Index* (IGI) terealisir 115,38%, Umur Harapan Hidup terealisir 100,30%, Angka Harapan Lama Sekolah terealisir 96,91%, Angka Kemiskinan terealisir 97%, Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan terealisir 541,83%, Cakupan Industri Kreatif terealisir 137,03%, Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, kuda, unggas) 3.420%, Pertumbuhan produksi tanaman pangan 112,18%, Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura terealisir 3.607,22%, Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan 110,67%, Pertumbuhan produksi perikanan 455,38%, Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur 99,40%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 100,22%, Desa Tangguh Bencana terealisir 129,45%, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan terealisir 114,02%.

IKU yang masuk kriteria Tinggi yaitu Pertumbuhan ekonomi terealisir 85,28% dan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terealisir 86,94%, IKU yang masuk kriteria Sedang yaitu IKU Pemerataan Pendapatan terealisir 71,84% dari target yang ditetapkan. Sedangkan IKU yang masuk kriteria Sangat Rendah yaitu IKU Angka Kriminalitas

terealisir 5,26% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat, kinerja pemerintah Kabupaten Bantul selalu berupaya untuk dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan kepedulian pemerintah daerah untuk selalu memperbaiki derajat pelayananannya. Oleh karenanya, segala program pembangunan pemerintah daerah selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Untuk mengukur derajat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, mulai periode awal RPJMD tahun 2016-2021 akan dilakukan perhitungan indeks tata kelola pemerintahan yang baik dalam wujud indeks tata kelola pemerintah yang baik (*Bantul Governance Index/Indonesia Governance Index*).

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indonesia Governance Index (IGI)	62,9**	65	75	115,38	85	88,24

Sumber : Bappeda, 2018, data diolah

*) angka sangat sementara

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah nilai 65 (baik), realisasi tercapai sebesar 75, atau tercapai 115,38% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 88,24% dari target akhir RPJMD tahun 2021.

Indonesia Governance Index (IGI) adalah pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan (*governance*) di Indonesia yang sangat komprehensif. Angka Indeks keseluruhan merupakan komposit dari empat arena tata kelola pemerintahan, yaitu Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil, dan Masyarakat Ekonomi. Keempat arena diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-fungsi pentingnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu Partisipasi, Akuntabilitas, Keadilan, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas. IGI merupakan sumber data yang kaya bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan, akademisi, peneliti, aktivis maupun masyarakat pada umumnya dan dapat menjadi rujukan untuk evaluasi dan advokasi berdasarkan data dan bukti (*evidence-based*).

Skala penilaian IGI berkisar dari angka 1 (sangat buruk) sampai dengan angka 10 (sangat baik). Namun dalam RPJMD Kabupaten Bantul, target ditentukan dengan menggunakan dua digit angka, sehingga IGI merupakan hasil pengukuran dikalikan 10.

Tabel III.4 Hasil Pengukuran Arena Indikator IGI

		Indeks Arena	Partisi pasi	Keadil an	Akuntabi litas	Transpa ransi	Efisien si
Pemerintah	6.89	6.78	6.42	7.39	7.45	6.72	6.59
Birokrasi	7.92	7.95	9.35	7.68	8.24	7.39	6.93
Masyarakat Sipil	7.56	7.52	7.74	7.41	7.67	7.3	7.72
Masyarakat Ekonomi	7.61	7.76	7.67	7.49	7.75	7.59	7.38

Sumber : Bappeda, 2018

Pada Tahun 2017, IGI Kabupaten Bantul mencapai angka 75 dengan Kategori Baik meningkat dibandingkan target Tahun 2017 pada angka 65 atau Kategori Cenderung Baik, realisasi sebesar 115,38% (kategori sangat tinggi). Di antara empat arena yang diukur, kinerja Arena Birokrasi (68,9) masuk dalam kategori Cenderung Baik, sementara Arena Masyarakat Sipil (75,6) dan Pemerintah (79,2) serta Masyarakat Ekonomi (76,1) masuk dalam kategori Baik.

Tercapainya kinerja IGI diatas didorong oleh penyelenggaraan pemerintahan di Bantul telah menunjukkan beberapa keberhasilan, diantaranya adalah hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2017 memperoleh nilai 77,90 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan

pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menunjukkan hasil yang baik.

Perbaikan akuntabilitas kinerja yang diterapkan telah memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul. Hal ini dilihat dari penyederhanaan sasaran strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, dapat mengefisienkan anggaran yang ada serta mengefisienkan kegiatan demi mewujudkan prioritas daerah.

Sasaran strategis yang dilaksanakan tahun 2017 telah berkurang sebanyak 36 dari tahun 2013, yaitu 51 sasaran strategis di tahun 2013 menjadi 15 sasaran strategis di tahun 2017. Indikator Kinerja Utama sebanyak 238 pada tahun 2013 berkurang sebanyak 219 menjadi 19 Indikator Kinerja Utama di tahun 2017. Sedangkan program berkurang sebanyak 176 dari tahun 2013 yaitu 176 program menjadi 169 program yang dilaksanakan tahun 2017. Kegiatan yang dilaksanakan pun berkurang 1.250 kegiatan jika dibandingkan dengan kegiatan tahun 2013 sebanyak 2.539 kegiatan menjadi 1.350 kegiatan di tahun 2017.



Gambar III.2 Bupati Bantul, Bapak Drs. H. Suharsono dalam
Penerimaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Selain akuntabilitas kinerja yang mendapatkan penilaian baik dengan predikat BB, hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) juga memberikan

hasil yang baik. Tahun 2017 Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 3,6608 (Sangat Tinggi), Tahun 2017 merupakan ketiga kalinya Bantul masuk kedalam peringkat 10 (sepuluh) besar berprestasi kinerja terbaik dan mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha.

Tahun 2017, Kabupaten Bantul juga telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya. Hal ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul yang baik dalam berkinerja memberikan pelayanan, demi kesejahteraan masyarakat Bantul.

Kabupaten Bantul juga melakukan upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), pada 4 (empat) SKPD, namun yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian PAN dan RB yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini berarti tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pelayanan publik yang berkualitas serta memiliki budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan berkualitas dan anti terhadap segala bentuk dan jenis tindak pidana korupsi.



Gambar III.3 SITUPAT (Siji Entuk Papat), Sekali Pengajuan Mendapatkan NIK, KK, Akta Kelahiran, dan KIA dalam Waktu 30 menit

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Bantul juga telah berkomitmen baik. Hal ini dilihat dari Rumah Sakit Panembahan Senopati yang mendapatkan penghargaan kategori Sangat Baik sebagai *Role Model* Penyelenggara Pelayanan Publik. Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik dilaksanakan terhadap 72 kabupaten/kota se

Indonesia. Sedangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu serta Dinas Kesehatan mendapatkan kategori Baik Pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki komitmen tinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di daerahnya.

Faktor pendorong lainnya adalah terkait dengan arena kebijakan pemerintah yang berorientasi untuk meningkatkan 3 sektor penting dalam kesejahteraan masyarakat yakni pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Cakupan pemenuhan terhadap sektor-sektor tersebut terus didorong untuk optimalnya pelayanan dan pemenuhan kepentingan masyarakat.

Kemudian optimalisasi keterlibatan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan yang luas dan dalam program yang demikian beragam dan ekstensif sehingga masyarakat sipil, institusi politik, dan masyarakat ekonomi berjalan selaras dan berinteraksi secara seimbang sehingga mampu mencapai visi bersama dalam bingkai kepentingan rakyat.

Permasalahan :

- a. Kualitas perencanaan pembangunan masih belum optimal bila dilihat dari kesesuaian RPJMD dengan APBD. Temuan ini mengindikasi adanya belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan maupun pertanggungjawaban tahunan.
- b. Selanjutnya membangun sistem dokumentasi dan administrasi seluruh kegiatan merupakan hal yang sangat urgen. Sistem dokumentasi ini merupakan awal upaya mewujudkan akuntabilitas dan melibatkan partisipasi publik secara substantif. Secara keseluruhan berdasarkan fungsi dan performa, beberapa PD dan DPRD memiliki performa cenderung rendah dan menarik kebawah kinerja Arena Pemerintah secara keseluruhan.
- c. Pada aspek kemudahan tata kelola investasi meningkatkan nilai investasi masih perlu ditingkatkan dan didorong dengan menerapkan reformasi pelayanan publik melalui optimalisasi fungsi pelayanan terpadu satu pintu.

Solusi :

- a. Perencanaan Sistemik Menjadi Kunci Reformasi Politik dan Birokrasi. Diperlukan sinkronisasi RPJMD dan APBD serta terbukanya transparansi anggaran untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas. Perencanaan yang konsisten dan

berkesinambungan akan diterapkan secara total untuk menjamin azas transparansi dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan Aplikasi SEPAK@T pada Proses Perencanaan Tahun 2018 diharapkan dapat memperkuat konsistensi, transparansi dan partisipasi serta akuntabilitas kinerja daerah.

- b. Meningkatkan kepemimpinan inovatif dalam rangka mendorong efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan inovasi pendekatan kepemimpinan yang lebih peka dan cepat menjawab permasalahan masyarakat adalah cara untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja pemerintahan dengan lebih menekankan pada *result-driven* dibandingkan dengan *process-driven of government*. Diharapkan dengan inovatif akan menyediakan kerangka kebijakan sekaligus menembuskekakuan birokrasi untuk mempercepat efektivitas kinerja pemerintah daerah.
- c. Mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan melalui akselerasi pelayanan terpadu satu pintu, dan perbaikan regulasi kemudahan penanaman modal dan insentif investasi

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya adalah dengan meningkatkan kemampuan perencanaan sistemik dengan menggunakan alat tolak ukur yang dapat mengukur semua arena akan dapat mendorong interaksi antar arena. Hal ini adalah kunci reformasi birokrasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan
3. Program pemberdayaan masyarakat
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
6. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
7. Program kerjasama informasi dengan mas media
8. Program pendidikan politik masyarakat
9. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
10. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

11. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
12. Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah
13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
17. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
18. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan
19. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20. Program pengembangan data/informasi
21. Program Kerjasama Pembangunan
22. Program perencanaan pembangunan daerah
23. Program perencanaan pembangunan ekonomi
24. Program perencanaan sosial dan budaya
25. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
26. Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
27. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah
28. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
29. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
31. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
32. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
33. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
34. Program Pengelolaan Barang Daerah
35. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan
36. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
37. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
38. Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa
39. Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
40. Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah
41. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
42. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan

43. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah
44. Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan
45. Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
46. Program peningkatan pelayanan masyarakat
47. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

2. Sasaran Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya digunakan Umur Harapan Hidup (UHH). UHH (*Expectation of Life/Eo*) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Peningkatan UHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan UHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat, dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

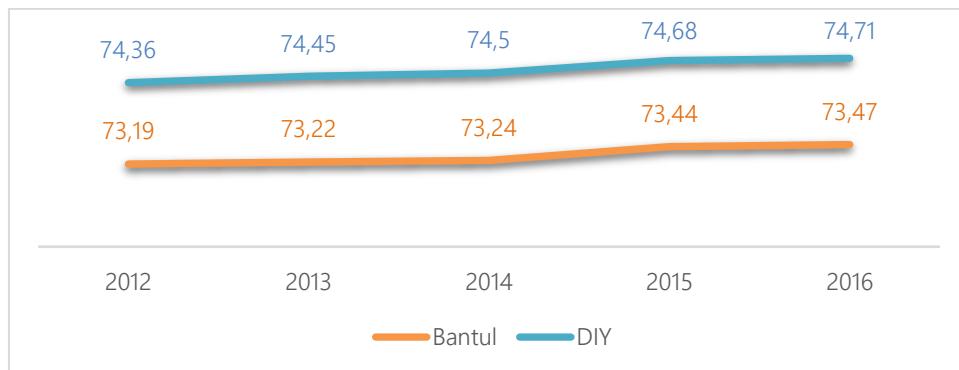
Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Umur Harapan Hidup	73,47	73,28	73,47*	100,26	73,33	100,19

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018, data diolah

*) angka sementara

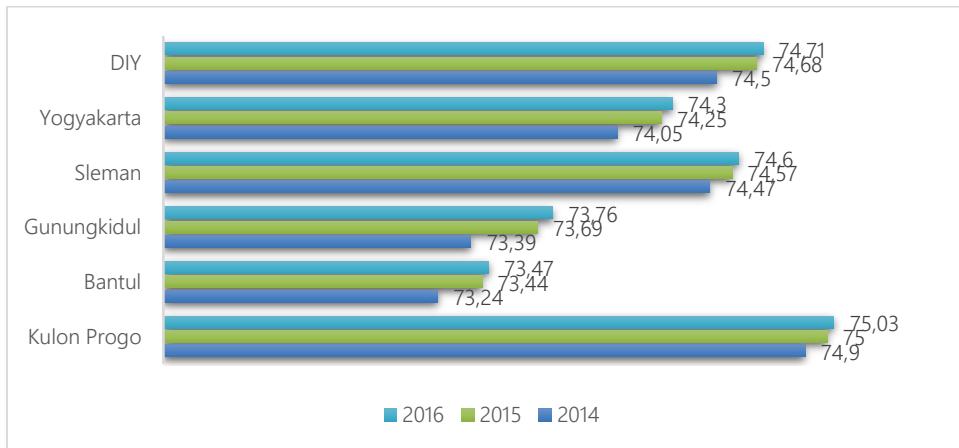
Sasaran untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2017, dari target 73,28 tahun, realisasi tahun 2017 menunjukkan bahwa umur harapan hidup penduduk Bantul mencapai 73,47 tahun atau 100,26% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Dengan capaian ini pula, telah mencapai 100,19% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Realisasi tahun 2017 masih menggunakan data UHH tahun 2016 yang dikeluarkan BPS.



Sumber : BPS, 2018

Gambar III.4 Perkembangan Umur Harapan Hidup Tahun 2012 - 2016

Trend Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada gambar berikut. UHH pada tahun 2012 sebesar 73,19, tahun 2013 sebesar 73,22 tahun, tahun 2014 sebesar 73,24 tahun, tahun 2015 sebesar 73,44 tahun, serta tahun 2016 sebesar 73,47 tahun. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan penting didalamnya.



Sumber : BPS, 2018

Gambar III.5 UHH Kabupaten/Kota di Wilayah DIY Tahun 2014 – 2016

Jika dibandingkan dengan UHH wilayah lain di Provinsi D.I.Yogyakarta ternyata dalam 3 tahun terakhir, UHH Kabupaten Bantul berada pada posisi terendah di DI.Yogyakarta. UHH tertinggi tahun 2016 berada di Kabupaten Kulon Progo yaitu 75,03 tahun diikuti Kabupaten Sleman yaitu 74,60 tahun, Kota Yogyakarta sebesar 74,3 tahun dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar 73,76 tahun. Sedangkan UHH penduduk provinsi D.I Yogyakarta tahun 2016 sebesar 74,71 tahun. Walaupun UHH Kabupaten Bantul terendah di Propinsi D.I. Yogyakarta, namun masih termasuk tinggi dibandingkan UHH sebagian besar Kabupaten/Kota lain di Indonesia, bahkan UHH Nasional 2016 hanya sebesar 70,9 tahun.

Untuk mendukung terwujudnya derajat kesehatan yang optimal, seluruh Puskesmas melakukan berbagai inovasi dalam pelayanannya di masyarakat, yaitu :

Tabel III.6 Inovasi Pelayanan Masyarakat

No.	Puskesmas	Inovasi
1	Srandakan	Posyandu Remaja Srandakan, Satu Jentik Satu Rumah Satu Pemantau Jentik
2	Sanden	Siswa Pemberantas Jentik (Si Petik), Kader Pemantau Batuk
3	Kretek	Siap Kesehatan Bagi Nelayan (Sikabayan)
4	Pundong	Peduli Jiwa Sehat
5	Bambanglipuro	Paguyuban Penderita DM dan Hipertensi, Zero Gizi Buruk, Masyarakat Peduli Kesehatan
6	Pandak I	Remaja Peduli Sampah
7	Pandak II	Remaja Peduli Gizi Balita

No.	Puskesmas	Inovasi
8	Bantul I	Dusun Sehat Jiwa, <i>Brain Booster</i>
9	Bantul II	Warga Sehat Jiwa, Kelompok Curhat Ibu Hamil
10	Jetis I	Kelompok Lansia Peduli Kesehatan, Sapa Sehat Puskesmas, <i>Healthy Club</i> Penderita DM Dan Hipertensi, Paguyuban Kuliner Peduli Sehat
11	Jetis II	Gerakan Peduli Kesehatan Jiwa
12	Imogiri I	Sedekah Sampah, Monitoring ASI <i>Mobile Imogiri</i>
13	Imogiri II	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ)
14	Dlingo I	Kedai Dapur Terapi Untuk Balita Gizi Buruk, Kelas Lansia
15	Dlingo II	Lansia Sehat Mandiri Aktif Produktif, Pendampingan Bumil
16	Pleret	Kawasan Bebas Asap Rokok Di Purworejo dan Bauman (Kabar Purba), Kartu Pemantauan Balita (Tuman Balita)
17	Piyungan	Keluarga Dan Kelompok Peduli Lansia, Dakwah Kreatif Phbs Di Pondok Pesantren, Duta KB, Gerakan Remaja menjadikan Ibu Sehat (Genre Mihat)
18	Banguntapan I	Bantu Penderita Tuberculosis
19	Banguntapan II	Sekolah Peduli Kasus Anemia dan Gizi, Gigi Sehat Untuk Semua, Rencana Untuk Pengamanan Air Minum Masyarakat (Rupamu Manis)
20	Banguntapan III	Gerakan Masyarakat Membasmi Jentik (Gemar Mbatik)
21	Sewon I	Dusun Pemantauan Sarang Nyamuk (PSN),
22	Sewon II	Forum Remaja Sehat (Fresh), Anak-Anak Peduli Demam Berdarah (Adinda)
23	Kasihan I	Dokter Luar Biasa (Dokter Lubis), Dusun Percontohan Germas
24	Kasihan II	Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwa (Gelimas Jiwo), Paguyuban Sehat Bersama Penyehat Tradisional, Gropyokan Omah Lemut (GOL)
25	Pajangan	Sahabat Edukasi Remaja, Pendampingan KDRT
26	Sedayu I	Masyarakat Mandiri Peduli Jentik di Dusun (Mama Petik Dusun), Gerakan Remaja Tangkis TB dan Anemia, Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (Gemas Darling)
27	Sedayu II	Dusun Siaga Beraksi, Karang Taruna Muda dalam Gerakan Masyarakat Sehat (Kamu Germas)

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Inovasi pelayanan di Dinas Kesehatan adalah Klik Puskesmas, yaitu upaya mempercepat akses informasi tentang pelayanan Puskesmas, dan SEPEKAN (Sekolah Peduli Kasus Anemia), yaitu pemeriksaan anemia pada remaja putri dan intervensi pemberian tablet

Fe bila terdapat tanda anemia, dan Wa Tantri (Wa Tanpa Antri), yaitu upaya mempercepat pelayanan rekomendasi perijinan kesehatan bagi masyarakat melalui WhatsApp).

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan tidak lepas dari peran aktif masyarakat dan dukungan seluruh sektor pemerintahan yang terkait, organisasi kemasyarakatan, para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan dalam menggerakkan, memfasilitasi serta membantu masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara mandiri.



Gambar III.6 Kampanye GERMAS untuk Guru TK, SD, SMP dan SMA
se Kabupaten Bantul Tahun 2017

Kabupaten Bantul telah mengadakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Tujuan GERMAS diantaranya menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular, baik kematian maupun kecacatan, menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk dan pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit.

Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Capaian kegiatan berupa deklarasi Stop BABS Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Nopember 2017 dan klaim 5 Desa (Desa

Panggungharjo, Desa Srimartani, Desa Bantul, Desa Tamanan dan Desa Banguntapan) melaksanakan 5 pilar STBM.

Kegiatan pelaksanaan Kabupaten Sehat yang memadukan upaya pemerintah dan peran aktif masyarakat pada tiap lokasi tatanan yaitu:

- a. Kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum yang berlokasi di Dusun Salakan, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan; Pasar Imogiri; dan SMA Negeri I Bantul;
- b. Kawasan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, berlokasi di Dusun Glugo, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon;
- c. Kawasan hutan sehat berlokasi di Dusun Pencitrejo, Desa Terong, Kecamatan Dlingo;
- d. Ketahanan pangan dan gizi berlokasi di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret;
- e. Kawasan pariwisata sehat berlokasi di Pantai Parangtritis, Kecamatan Kretek;
- f. Kehidupan sosial yang sehat berlokasi di Dusun Nglaren, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan;
- g. Kawasan industri dan perkantoran sehat berlokasi di Dusun Celan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan dan Perkantoran Pemda II di Manding, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul.



Gambar III.7 Bapak Wakil Bupati menerima Piagam dan
Piala Swasti Saba Wistara Kabupaten Sehat

Bantul juga menerima Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba Wistara Klasifikasi Pengembangan untuk kedua kalinya. Ini merupakan predikat tertinggi dalam penghargaan kabupaten sehat.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang umur harapan hidupnya.

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah mutu pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan. Penilaian mutu pelayanan Puskesmas yang terstandar oleh Kementerian Kesehatan adalah Akreditasi Puskesmas. Hasil penilaian akreditasi puskesmas dengan kategori paripurna diraih Puskesmas Pajangan. Kategori Utama diperoleh 10 puskesmas, kategori madya diberikan pada 11 puskesmas, dan kategori dasar pada 2 puskesmas. Selebihnya yaitu 3 puskesmas sudah dilaksanakan penilaian, namun status belum ditetapkan Komisi Akreditasi.

Tabel III.7 Hasil Penilaian Akreditasi Puskesmas Tahun 2015-2017

No.	Puskesmas	2015	2016	2017	Status
1.	Pajangan		✓		Paripurna
2.	Pleret		✓		Utama
3.	Piyungan		✓		Utama
4.	Banguntapan II		✓		Utama
5.	Srandakan		✓		Madya
6.	Sanden		✓		Madya
7.	Pundong		✓		Madya
8.	Bantul I		✓		Madya
9.	Imogiri I		✓		Madya
10.	Bambanglipuro	✓			Madya
11.	Jetis I		✓		Dasar
12.	Jetis II	✓			Dasar
13.	Kasihan I			✓	Utama
14.	Pandak I			✓	Utama
15.	Pandak II			✓	Utama
16.	Kretek			✓	Utama

No.	Puskesmas	2015	2016	2017	Status
17.	Bantul II			✓	Utama
18.	Imogiri II			✓	Madya
19.	Dlingo I			✓	Madya
20.	Dlingo II			✓	Utama
21.	Sewon I			✓	Madya
22.	Sewon II			✓	Utama
23.	Sedayu I			✓	Madya
24.	Sedayu II			✓	Madya
25.	Banguntapan I			✓	Status belum ditetapkan Komisi Akreditasi
26.	Banguntapan III			✓	Status belum ditetapkan Komisi Akreditasi
27.	Kasihan II			✓	Status belum ditetapkan Komisi Akreditasi

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Faktor kecukupan tenaga kesehatan dibandingkan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya rasio dokter umum dibanding jumlah penduduk adalah 40/100.000 penduduk. Dengan demikian pada tahun 2017, Kabupaten Bantul membutuhkan dokter umum sejumlah 371 orang. Rasio dokter spesialis adalah 6/100.000 penduduk atau dibutuhkan sejumlah 56 dokter spesialis.

Rasio ketersediaan tenaga dokter umum maupun dokter spesialis di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebesar 13/100.000 dokter umum dan meningkat menjadi 28/100.000 dokter umum pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan masih perlunya tenaga dokter umum. Sedangkan rasio dokter spesialis sebesar 22/100.000 penduduk dan sudah mencukupi kebutuhan dokter spesialis.

Tabel III.8 Jumlah Dokter Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Dokter Umum	123	106	103	186	261

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
2	Jumlah Dokter Spesialis	38	39	46	149	206
3	Jumlah Penduduk	938.433	968.632	971.511	928.676	931.356
4	Rasio Dokter Umum (per 100.000 penduduk)	13	11	11	20	28
5	Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	4,0	4,0	5,0	16	22

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Jangkauan atau akses pelayanan kesehatannya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul. Setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas dengan jumlah puskesmas 27 unit pada 17 kecamatan, dengan jumlah Puskesmas yang tersebar pada tiap Kecamatan, maka masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan sangat mudah. Selain itu, sudah hampir seluruh desa di Kabupaten Bantul telah memiliki puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul sebanyak Pustu 65 unit pada 75 Desa. Puskesmas pembantu ini tersebar pada wilayah padat penduduk, sehingga Puskesmas pembantu ini dapat menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bantul. Kondisi wilayah sebagian besar adalah dataran yang cukup menguntungkan bagi masyarakat karena mudah dalam menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan jarak terjauh dari desa dalam satu Kecamatan ke Pusat Kesehatan Masyarakat hanya ± 3 Km

**Tabel III.9 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bantul
Tahun 2014 – 2017**

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2014 (unit)	2015 (unit)	2016 (unit)	2017 (unit)
1	Rumah Sakit Umum	10	10	10	11
2	Rumah Sakit Bersalin	1	1	0	0
3	Rumah Sakit Khusus (bedah, paru, KIA)	3	3	5	5
4	Klinik Utama	2	2	2	3
5	Klinik Pratama	24	30	47	55
	Klinik Pratama Rawat Jalan	-	-	38	45
	Klinik Pratama Rawat Inap	-	-	9	10
6	Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik	5	5	4	5
7	Apotek	100	107	123	125
8	Klinik kecantikan estetika	5	5	10	9
9	Laboratorium	4	4	4	3
10	Toko obat	1	4	4	5
11	Optik	12	11	12	12

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2014 (unit)	2015 (unit)	2016 (unit)	2017 (unit)
12	Puskesmas rawat inap	16	16	16	16
13	Puskesmas non rawat inap	11	11	11	11
14	Puskesmas pembantu	67	67	65	65
15	Puskesmas keliling	27	27	27	27
16	Posyandu	1132	1132	1132	1132
17	Posyandu lansia	901	901	901	967

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul cukup banyak dan merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu. Fasilitas dan sarana kesehatan yang cakupannya sudah luas di Kabupaten Bantul ini sangat membantu akses masyarakat, mengingat wilayah Bantul sendiri adalah wilayah yang memiliki kondisi geografis yang beragam

Selain itu, data penting yang terkait dengan pencapaian sasaran peningkatan angka harapan hidup adalah cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 866.980 jiwa pada tahun 2017. Jaminan kesehatan yang berupa jamkesda, jamkesos atau yang lainnya merupakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh fasilitas Kesehatan yang layak pada wilayah tingkat Desa atau Kecamatan masing-masing.

Tabel III.10 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2016 - 2017

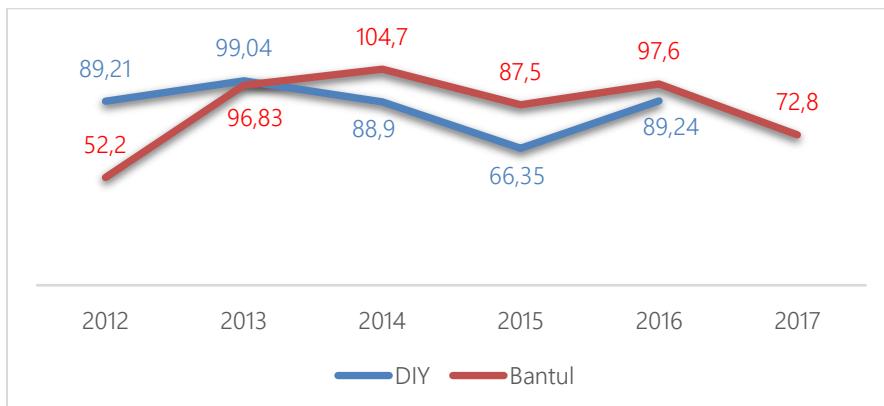
No.	Jenis Kepesertaan	Jumlah Peserta (jiwa)	
		2016	2017
1	BPJS		
	a. Penerima Bantuan Iur (PBI)	500.101	520.985
	b. Non PBI	212.744	250.143
2	Jamkesda	121.666	85.803
3	Jamkessos	87.931	10.049
	Jumlah	922.442	866.980
	Persentase	99,33	93,03

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat antara lain :

1. Angka Kematian Ibu (AKI) yang fluktuatif.

Kematian ibu pada tahun 2017 sebanyak 9 kasus kematian atau AKI sebesar 72,8 per 100.000 kelahiran hidup dan terjadi penurunan kematian dibanding tahun 2016 sebanyak 12 kasus kematian atau AKI sebesar 97,66 per 100.000 kelahiran hidup. Pencapaian AKI ini telah mencapai target provinsi DIY sebesar 100 per 100.000 kelahiran hidup. Selanjutnya kecenderungan AKI pada enam tahun terakhir disajikan pada gambar berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Gambar III.8 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu di Provinsi DIY Tahun 2011 – 2016

Gambar diatas menunjukkan capaian AKI per tahun mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada tahun 2017. Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan kronologis kasus sampai terjadinya kematian.

Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai.

Kematian ibu disebabkan oleh perdarahan sebanyak 2 kasus, PER/PEB/Eklampsi sebanyak 2 kasus, infeksi sebanyak 2 kasus, psikosis post partum dengan acute coronary syndrome sebanyak 1 kasus dan lain-lain/penyakit penyerta sebanyak 2 kasus.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian ibu pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

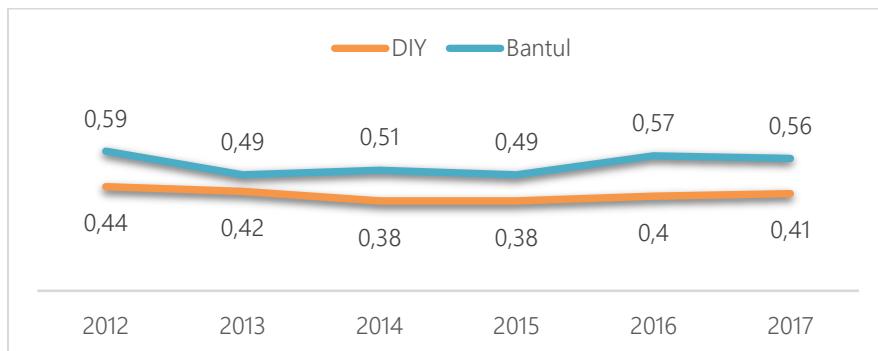
- a. Peningkatan SDM Kesehatan: Sosialisasi pengenalan deteksi dini resiko ibu hamil resiko tinggi.
- b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Audit Maternal Perinatal, Diseminasi Hasil Rekomendasi Tingkat Kabupaten, Review Deteksi Dini Ibu Hamil Beresiko, Sosialisasi Asuhan Persalinan Normal, Rakor Koordinator KIA dan KB.
- c. Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program
- d. Pemantapan sistem rujukan
- e. Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal)

Promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan melalui program inovatif Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK) yang merupakan program penyelesaian masalah kesehatan secara komprehensif, yaitu penurunan kematian ibu, kematian bayi, balita gizi buruk, penanggulangan demam berdarah, dan pencegahan penyakit TBC

2. Peningkatan kasus gizi buruk

Status gizi masyarakat dilihat dari potret status gizi buruk balita. Status gizi buruk balita tahun 2017 sebesar 0,41%, dimana status gizi buruk balita mengalami kecenderungan kenaikan dari 2016 ke tahun 2017. Tahun 2016 sebesar 0,40%, mengalami kenaikan sebesar 0,01% pada tahun 2017.

Jumlah balita berstatus gizi buruk tahun 2017 sesuai standar Berat Badan menurut Umur (BB/U) sebanyak 202 balita dengan prevalensi sebesar 0,41% dari target 0,37%. Terdapat peningkatan status gizi buruk, pada tahun 2016 sebanyak 195 Balita dengan prevalensi sebesar 0,40%. Hal ini perlu diwaspadai mengingat gizi Balita menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasannya dimasa depan. Kecenderungan status gizi buruk Balita mulai dari tahun 2012 - 2017 digambarkan pada grafik berikut ini :



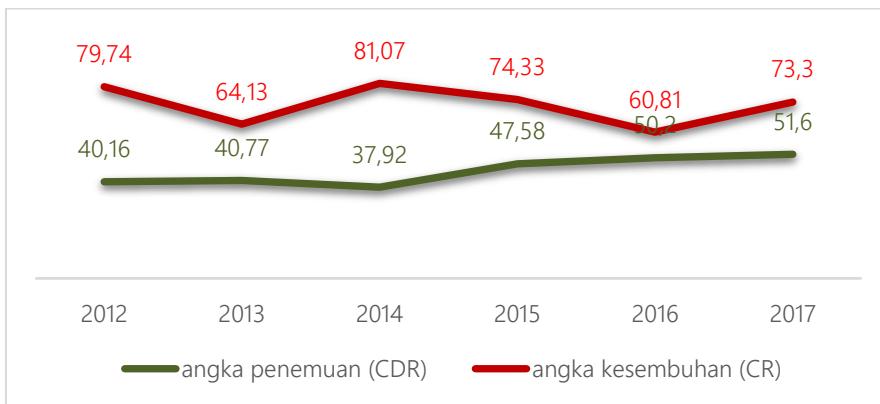
Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Gambar III.9 Angka Status Gizi Buruk Bantul dan DIY Tahun 2012 – 2017

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka status gizi buruk Balita pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi petugas dan kader,
 - b. implementasi, dukungan dan pemantauan pemberian ASI Eksklusif, dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD),
 - c. surveilans gizi, dan pemberian intervensi
 - d. konsultasi dan pemeriksaan balita oleh dokter ahli,
 - e. pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita kurus, Bumil KEK, dan Baduta dari keluarga miskin,
 - f. pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu),
 - g. program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK).
3. Angka penemuan kasus TB (*case detection rate*) dan angka kesembuhan (*cure rate*)

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh *mycobacterium*, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh dimana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Infeksi bakteri ini biasanya menyebar melewati pembuluh darah dan kelenjar getah bening, tetapi secara utama menyerang paru-paru. Tuberkulosis adalah penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan yang ada dilingkungannya.



Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Gambar III.10 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB
di Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2017

Angka penemuan kasus TB (*case detection rate*) terlihat meningkat, menunjukkan upaya pemerintah bersama masyarakat dalam menemukan kasus TB secara aktif dan selektif (*Active Selective Case Finding*) berjalan dengan baik. Namun demikian, angka kesembuhan (*cure rate*) tampak fluktuatif, dan terjadinya penurunan cakupan disebabkan antara lain karena putus obat dari pasien TB dan adanya kasus TB dengan jenis *Multi Drug Resisten* (TB MDR).

Solusi :

1. Dalam rangka mengatasi permasalahan AKI yang fluktuatif, dilaksanakan berbagai upaya antara lain :
 - a. Peningkatan kualitas ANC terpadu di puskesmas maupun dengan melibatkan fasilitas kesehatan dalam suatu wilayah kerja puskesmas
 - b. Peningkatan sosialisasi deteksi dini tanda bahaya ibu hamil pada ibu hamil dan masyarakat melalui sarana edukasi buku KIA
 - c. Pembentukan kelas ibu hamil di Puskesmas untuk lebih menjamin kontinyuitas edukasi dan juga pemeriksaan oleh dokter spesialis *obsgin* di Puskesmas
 - d. Pemantauan ibu hamil dan bayi berisiko melalui kunjungan rumah
 - e. Pelaksanaan kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk perbaikan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA)

- f. Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dalam pelayanan KIA melalui kegiatan update knowledge untuk pengembangan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
 - g. Pencanangan gerakan Optimalisasi Ambulan Desa (Timbul Desa)
 - h. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kader kesehatan dalam deteksi dini kehamilan berisiko, dan pendampingan bumil berisiko
 - i. Evaluasi manual rujukan KIA dan peningkatan deteksi dini risiko dan tanda bahaya kehamilan pada petugas dan fasilitas kesehatan swasta
 - j. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis
 - k. Optimalisasi SMS Bunda sebagai media
 - Edukasi perawatan kehamilan melalui media sosial yang memudahkan untuk diakses oleh ibu hamil secara kontinyu
 - Informasi dan tips kesehatan bagi ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun
 - Biaya pendaftaran sesuai tarif sms, setelahnya ibu akan menerima sms sejak hamil sampai anak berusia 2 tahun
 - Ketik : SMSbunda kirim ke 08118469468
 - l. Promosi dan pemberdayaan kesehatan melalui program inovatif Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK) yang merupakan program penyelesaian masalah kesehatan secara komprehensif, yaitu penurunan kematian ibu, kematian bayi, balita gizi buruk, penanggulangan demam berdarah, dan pencegahan penyakit TBC.
2. Solusi untuk mengatasi permasalahan kasus gizi buruk yang meningkat antara lain :
 - a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) selama 180 hari makan bagi 600 Balita dan PMT untuk 90 hari makan bagi 300 ibu hamil KEK;
 - b. Surveilens gizi/pelacakan kasus Balita gizi buruk;
 - c. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi spesialis anak;
 - d. Pemantauan status gizi Balita;
 - e. Sosialisasi pemanfaatan bahan makanan lokal sebagai solusi peningkatan biaya belanja bahan makanan yang mengurangi daya beli masyarakat untuk pemenuhan gizi seimbang;
 - f. Peningkatan pemberian pendidikan kesehatan mengenai PHBS dan pola asuh bagi masyarakat;

- g. Peningkatan kualitas penggiatan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir dan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan disertai penyediaan ruang laktasi di fasilitas pelayanan kesehatan dan OPD
3. Solusi untuk mengatasi permasalahan angka kesembuhan kasus TB di bawah target antara lain :
 - a. Meningkatkan peran serta dari layanan kesehatan swasta dalam penemuan TB melalui supervisi oleh wasor TB/*District officer* TB, dan pengelola program HIV;
 - b. Kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat:
 - Kolaborasi dengan PD Aisyiyah
 - Revitalisasi Gerakan Terpadu Daerah (Gerduda) Kecamatan
 - c. Penyediaan ruang tersendiri untuk poli batuk dan TB MDR di Puskesmas;
 - d. Pendampingan penemuan TB di Puskesmas melalui kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan fokus pada:
 - Penyegaran tentang strategi DOTS;
 - *Active Selective Case Finding* (ASCF) melalui pemeriksaan dahak pada suspek;
 - Pemberian makanan tambahan pada penderita TB yang sedang diobati

Kedepan akan terus diupayakan langkah-langkah strategi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut :

1. Melaksanakan 3 (tiga) pilar utama Program Indikator Sehat yaitu :
 - a. Penerapan paradigma sehat,
Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat.
 - b. Penguatan pelayanan kesehatan,
Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan
 - c. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat (*benefit*), serta kendali mutu dan biaya

2. Menerapkan strategi operasional pembangunan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
3. Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) secara menyeluruh.
Tujuan GERMAS diantaranya menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular, baik kematian maupun kecacatan, menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk dan pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit. GERMAS dimulai dengan 3 fokus kegiatan, yaitu meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah serta deteksi dini penyakit penyakit tidak menular
4. Peningkatan pelayanan di Puskesmas pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), akses dan mutu layanan.
5. Penyelenggaraan jejaring kemitraan dengan fasilitas pelayanan kesehatan ataupun lembaga lainnya untuk turut menyelesaikan masalah-masalah kesehatan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2017, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sebagai berikut :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
11. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
12. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

13. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
14. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
15. Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
16. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
17. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
18. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
19. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
20. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
21. Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan
22. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
23. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
24. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

3. Sasaran Terwujudnya Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas

Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Bupati terpilih yakni terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam wadah NKRI.

Sasaran Terwujudnya Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas ditegaskan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dalam misi 2 "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Berkepribadian Luhur". Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel III.11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas

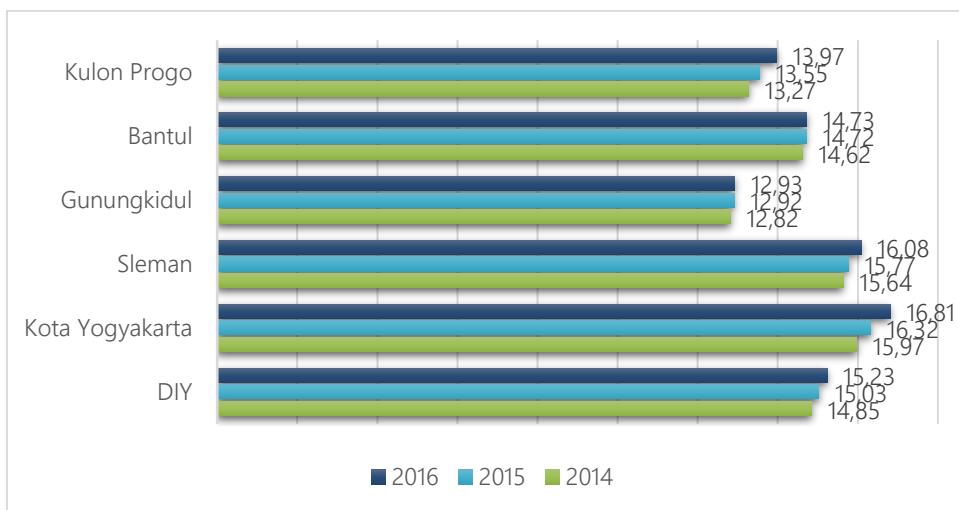
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	14,73	15,2	14,73*	96,91	15,9	92,64

Sumber : BPS, 2018

*) angka sangat sementara

Sasaran untuk mewujudkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2017, dari target 15,2 tahun, realisasi tahun 2017 menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah penduduk Bantul mencapai 14,73 tahun atau 96,91% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Dengan capaian ini pula, telah mencapai 92,64% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Realisasi tahun 2017 masih menggunakan data AHLS tahun 2016 yang dikeluarkan BPS.

Angka Harapan lama Sekolah Bantul sebesar 14,73 tahun, artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk (usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah 14,73 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh jenjang pendidikan hingga Diploma II.



Sumber : BPS, 2017

Gambar III.11 Trend Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2014 - 2016

Angka HLS di Provinsi D.I Yogyakarta yang tertinggi adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 16,81 tahun dan berikutnya adalah Kabupaten Sleman sebesar 16,08 tahun. Kabupaten Bantul berada pada posisi ketiga. Apabila dibandingkan dengan angka provinsi, angka HLS Kabupaten Bantul masih berada di bawah angka Provinsi D.I Yogyakarta (15,23 tahun) dan terpaut 0,50 poin.

Angka HLS Kabupaten Bantul tahun 2016 meningkat 0,01 poin dibandingkan tahun 2015. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran serta dari pihak pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu adanya program beasiswa, dana biaya operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua siswa.



Gambar III.12 Penyerahan Piala Kehuaraan OSN Tahun 2017

Pembangunan pendidikan telah menunjukkan keberhasilan dan peningkatan, yang dapat digambarkan antara lain melalui:

1. Angka Partisipasi Kasar:
 - a. SD/MI sebesar 98,20%, menunjukan adanya kenaikan sebesar 2,08% dari capaian tahun 2016 sebesar 96,12%;
 - b. SMP/MTs sebesar 99,45%, menunjukan adanya kenaikan sebesar 4,45% dari capaian tahun 2016 yang sebesar 95,00%.
2. Angka Partisipasi Murni:
 - a. SD/MI sebesar 88,68%, menunjukan adanya kenaikan sebesar 4,58% dari capaian tahun 2016 yang sebesar 84,10%;

- b. SMP/MTs sebesar 76,60%, menunjukan adanya kenaikan sebesar 5,51% dari capaian tahun 2016 yang sebesar 71,09%.

Persentase APK/APM yang tidak mencapai 100 tersebut mengindikasikan bahwa sebagian anak Bantul mengikuti pendidikan di luar Bantul.

3. Tingkat kelulusan :
 - a. SD/MI mencapai 100%, sesuai target;
 - b. SMP juga sebesar 100%, sama dengan tahun 2015.
4. Angka Putus Sekolah :
 - a. SD/MI sebesar 0,01, sesuai target;
 - b. SMP juga sebesar 0,02, menunjukan adanya penurunan sebesar 0,01 dari capaian tahun 2016 yang sebesar 0,03.

Jumlah lulusan pada jenjang TK sebanyak 12.756 siswa yang melanjutkan sekolah di jenjang SD/MI sebanyak 13.601 siswa. Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 12.365 siswa yang melanjutkan sekolah di jenjang SMP/MTs sebanyak 13.161 siswa.

Besaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) direncanakan akan dinaikkan secara bertahap sehingga pada lima tahun ke depan besaran BOP sudah bisa mendekati Unit Cost Standar untuk masing-masing jenjang pendidikan. Pada tahun 2017 untuk jenjang SD/MI besaran BOP dan BOS sebesar 1.050.000/siswa/tahun sudah mencapai 75,00% dari *Unit Cost Standar*, sedangkan untuk jenjang SMP/MTS besaran BOP dan BOS sebesar 1.350.000/siswa/tahun sudah mencapai 58,70% dari *Unit Cost Standar*.



Gambar III.13 Simulasi Pelaksanaan UNBK

Hal yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat Bantul salah satunya adalah perpustakaan. Selain Kantor Perpustakaan Umum, juga diadakan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kecamatan dan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Selain perpustakaan, terdapat 26 Taman Bacaan Masyarakat juga memberikan dukungan terhadap perwujudan akses dan mutu pendidikan masyarakat yang berkualitas.

Permasalahan :

1. Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM;
2. Biaya Operasional pendidikan masih belum tercapai
3. Untuk memenuhi SPM pendidikan dasar masih diperlukan pemenuhan sarana-prasarana seperti laboratorium, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang perpustakaan.
4. Kurangnya guru kelas pada jenjang SD, sebanyak 931 guru PNS. Rasio guru siswa saat ini sebesar 1:42, sedangkan standar minimalnya adalah 1:20.
5. Perlu peningkatan Kesejahteraan bagi GTT dan PTT
6. Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaran Pendidikan Non Formal

Solusi :

1. Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM.
2. Perencanaan anggaran pendidikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
3. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap.
4. Optimalisasi pendidik dan pemberdayaan guru kontrak oleh dewan sekolah.
5. Kesejahteraan bagi GTT dan PTT diupayakan penambahan insentif secara bertahap.
6. Dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk memberikan motivasi agar warga belajar memiliki kesadaran untuk belajar secara aktif di PKBM masing-masing.



Gambar III.14 Gebyar Penganugerahan
Ki Hajar Dewantara SD 1 Bantul

Kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan pemerintah maupun swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait mewujudkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas. Pada tahun 2017, sebanyak 8 (delapan) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

4. Sasaran Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu

Amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat menyatakan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia ini dibentuk untuk: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi dari "memajukan kesejahteraan umum "rakyat Bantul" dilaksanakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, meningkatkan daya saing berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan sarana dan prasarana publik.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, sejak Tahun 2011 terus mengalami penurunan, sehingga terjadi peningkatan persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

Tabel III.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu

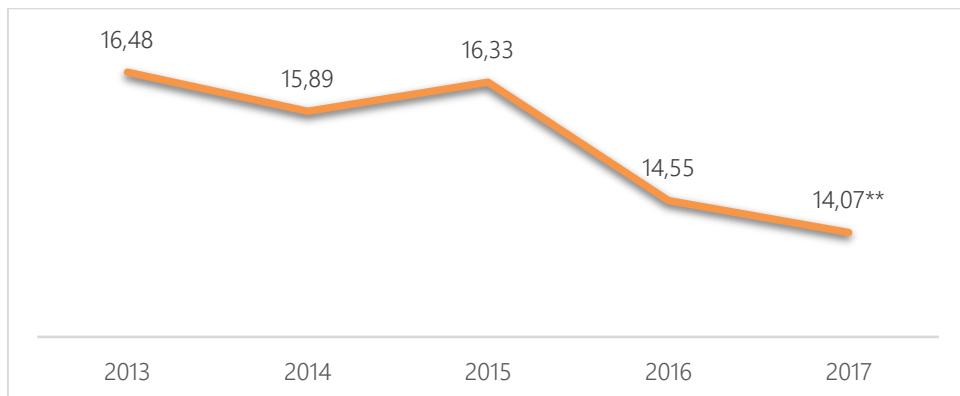
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Angka kemiskinan	14,55	13,66	14,07**	97,00	10,66	68,01

Sumber :BPS, 2018, data diolah

**) angka sangat sementara

Sasaran turunnya jumlah masyarakat kurang mampu menunjukkan kinerja Sangat Tinggi. Hal ini dilihat dari pencapaian indikator angka kemiskinan yang mengalami capaian 97,00% dari target yang ditetapkan. Tahun 2017 realisasi angka kemiskinan sebesar 14,07% dari target sebesar 13,66%. Capaian ini menyumbangkan sebesar 68,01% dari target RPJMD tahun 2021, angka kemiskinan sebesar 10,66%.

Dengan menggunakan dasar penghitungan sementara proyeksi dari BPS maka diperoleh persentase tingkat kemiskinan tahun 2017 sebesar 14,07%, lebih rendah dari tahun 2016 yaitu sebesar 14,54%, mengalami penurunan sebesar 0,48% dibandingkan dengan tahun 2016. Angka kemiskinan Bantul masih di atas angka kemiskinan DIY yaitu 12,36% dan Nasional yaitu 10,12%.

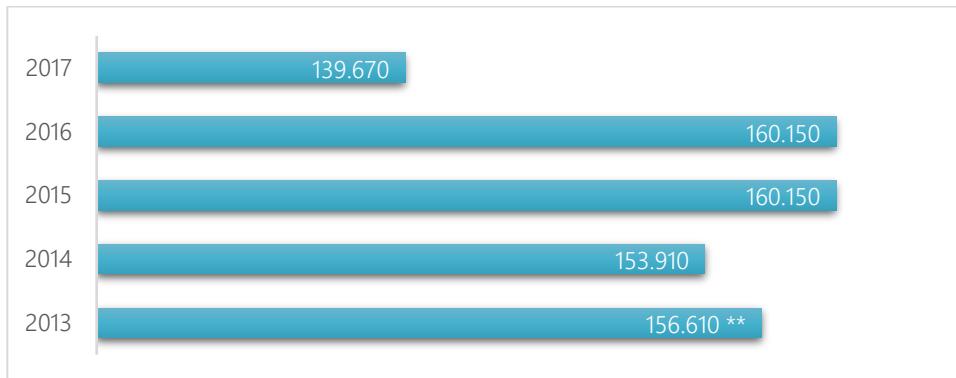


Sumber : BPS, 2018

**) angka sangat sementara

Gambar III.15 Trend Angka Kemiskinan Tahun 2013 – 2017

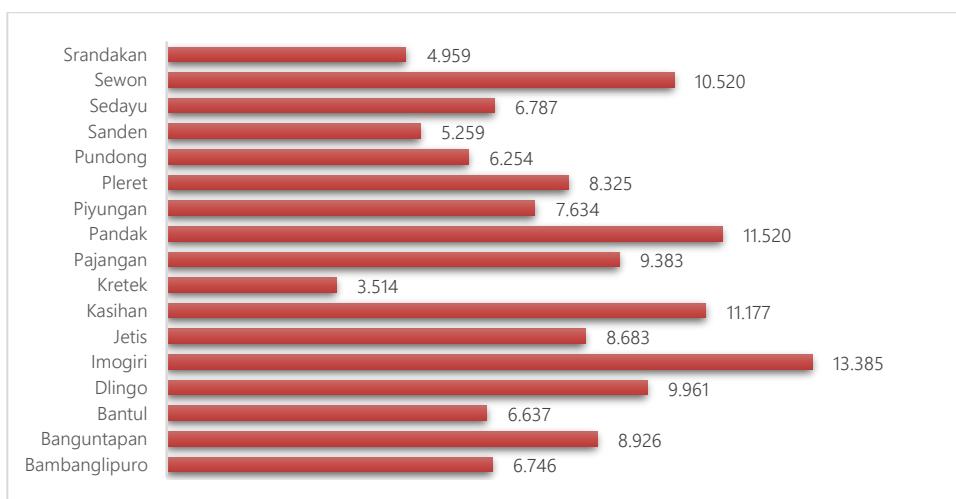
Adapun data tentang jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebanyak 139.670 jiwa, mengalami penurunan sebesar 20.480 jiwa dari data penduduk miskin tahun 2016 sebanyak 160.150 jiwa.



Sumber : Bappeda, 2018

Gambar III.16 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013 -2017

Di lihat dari sebarannya, persentase penduduk miskin di kawasan perkotaan (Banguntapan 8,30%, Bantul 10,57% dan Sewon 10,84) lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di kawasan pedesaan (Pajangan 26,89%, Dlingo 25,87%, Pandak 22,37% dan Imogiri 21,41%). Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk miskin masih berada di wilayah perdesaan. Hal ini bisa dipahami karena penduduk perdesaan memiliki akses layanan publik yang lebih rendah, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian di mana nilai produk pertanian telah semakin menurun. Karenanya, penduduk perdesaan memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan



Sumber : Bappeda, 2018

Gambar III.17 Jumlah Jiwa Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2017

Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, jumlah jiwa miskin tertinggi ada pada kecamatan Imogiri, Pandak, Kasihan dan Sewon. Sedangkan jumlah jiwa miskin yang rendah terdapat di Kretek, Srandakan, Sanden dan Pundong.

Hasil identifikasi terhadap wilayah dengan jumlah jiwa miskin tertinggi tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor-faktor :

1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga memberi dampak terhadap penanganan kemiskinan menjadi lebih kompleks.
2. Potensi perekonomian wilayah yang sebagian besar didominasi oleh sektor pertanian dan menjadi mayoritas menjadi lapangan pekerjaan utama, sehingga terjadinya perlambatan pada sektor pertanian memberi dampak terhadap peningkatan kemiskinan.
3. Kategori jumlah penduduk dengan usia tidak produktif (*golden age*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga upaya penanganan kemiskinan kurang berhasil.
4. Merupakan daerah yang berada di perbatasan perkotaan dan di wilayah perdesaan sehingga rentan terhadap persaingan, perubahan dan dinamika perekonomian.

Pengurangan angka kemiskinan setiap tahunnya menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bantul yang dilakukan melalui program berkelanjutan antara lain : program penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat pedukuhan, pemuthakiran data kemiskinan melalui Mekanisme Pemuthakiran Mandiri (MPM), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), program pemberdayaan masyarakat melalui Produk Andalan Setempat (PAS), Program Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) serta kegiatan-kegiatan pelatihan.



Gambar III.18 Kipas Bambu Jipangan Salah Satu PAS

Sejak tahun 2013, telah dikembangkan program dalam penanganan kemiskinan yaitu *One Village One Product* (OVOP) atau satu wilayah menghasilkan satu macam produk andalan. Dari berkembangnya potensi wilayah tersebut, masyarakat dapat mengoptimalkan hasil produknya selain sebagai ciri khas produk dari wilayahnya, hasil produk tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraannya serta mengentaskan kemiskinan. Program OVOP ini di Bantul dinamakan Produk Andalan Setempat (PAS). PAS ini didukung promosi akses pasar bagi produk hasil industry di dalam dan luar negeri, melalui berbagai ajang pameran. Selain itu, program bantuan keuangan khusus ekonomi produktif dari Pemerintah DIY secara berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan.

Permasalahan :

1. Kurang optimalnya sinergitas program penanggulangan kemiskinan
2. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensinya untuk meningkatkan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinannya.
3. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana produksi usaha ekonomi masyarakat miskin yang kurang memadai.

Solusi :

1. Optimalisasi fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan

2. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang berbasis wilayah dan ekonomi lokal.
3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan memanfaatkan potensi lokal.
4. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong akses terhadap layanan publik dan pasar yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan pedesaan. Dengan cara ini, upaya menjawab tingginya persentase penduduk miskin di kawasan pedesaan bisa dilakukan dengan lebih efektif dengan manfaat berupa peningkatan pendapatan masyarakat

Guna mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bantul, terus diupayakan kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta pengorganisasian masyarakat sebagai berikut :

- a. Membuka peluang pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang berbasis masyarakat seperti dibukanya obyek wisata baru yang berbasis alam dan pedesaan, pengembangan sentra-sentra kerajinan, dan usaha-usaha kuliner baru;
- b. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
- c. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
- d. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat;
- e. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
- f. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
6. Program Penempatan Tenaga Kerja
7. Program Perluasan Kerja
8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
9. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
11. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
12. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
13. Program pemberdayaan masyarakat
14. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
15. Program Keluarga Berencana
16. Program pelayanan kontrasepsi
17. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
18. Program transmigrasi regional

5. Sasaran Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi – yang diwakili antara lain oleh pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan – tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pendapatan secara umum menggambarkan sejauhmana manfaat dari hasil pembangunan telah dirasakan oleh masyarakat. Melalui indikator tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Namun demikian, penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan, pemerataan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Peran dari pihak

non negara, seperti swasta dan masyarakat adalah pilar kunci yang menyumbang pada capaian pemerataan pendapatan.

Tabel III.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,06	5,3	4,52	85,28	5,6	80,71
2.	Pemerataan Pendapatan	0,3967	0,3121	0,4126	67,80	0,3025	63,60

Sumber : BPS, 2018

Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas dari Misi 3 "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan".

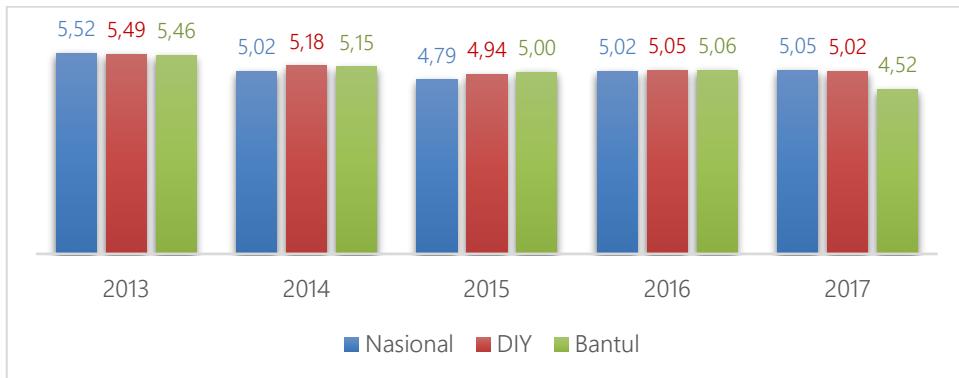
1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan Ekonomi ditargetkan naik dari tahun 2016 sebesar 5,25% menjadi 5,3% pada tahun 2017. Realisasi pencapaian sebesar 4,52% atau sebanyak 85,28% dari target yang direncanakan. Ini menunjukkan capaian kinerja Tinggi untuk tahun 2017. Selain itu, jika disandingkan dengan target RPJMD, capaian ini telah menyumbang sebanyak 80,71% dari target RPJMD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% pada tahun 2021.

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan, pertumbuhan PDRB, dan PDRB per kapita.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 4,52 persen atau mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016 yang mampu tumbuh 5,06 persen. Pertumbuhan ini dibawah pertumbuhan DIY (5,02%) maupun nasional (5,05%). Kondisi ini dinyatakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul sedikit melambat. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul salah satu akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi secara nasional. Beberapa

faktor yang mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi ini adalah bergesernya sektor primer ke sektor tersier. Kondisi ini sangat wajar terjadi dimana masyarakat beralih dari sektor pertanian ke sektor jasa maupun industri pengolahan.



Sumber : BPS, 2018

Gambar III.19 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2013 – 2017

Nilai PDRB per kapita atas dasar berlaku sejak tahun 2011-2016 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 20,924 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 22,816 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Bantul tahun 2017 atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 17,117 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 4,52 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai 16,377 triliun rupiah. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi seluruh sektor ekonomi dan sudah terbebas dari pengaruh inflasi.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi tahun 2017 di Kabupaten Bantul terutama didukung oleh kinerja pada sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, dan konstruksi yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2016. Adapun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar dalam aktivitas perekonomian Kabupaten Bantul mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Nilai tambah dari sektor ini dalam menyumbang perekonomian Kabupaten Bantul tidak sebaik tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017, kontribusi sektoral pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul didominasi oleh tiga sektor ekonomi, yaitu: sektor industri pengolahan sebesar 15,21 persen; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,55 persen; dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,72 persen. Sedangkan keempat belas sektor lainnya hanya mampu menyumbang pembentukan PDRB Kabupaten Bantul kurang dari sepuluh persen dan secara keseluruhan, ketiga sektor tersebut menyumbang PDRB sekitar 39 persen.

Kondisi ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2017 dari sisi transformasi struktural pada tiga sektor tidak mengalami perubahan. Ketiga sektor tersebut adalah yang pertama, sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (2) pertambangan dan penggalian. Kedua, sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) pengadaan listrik dan gas; (3) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan (4) konstruksi. Ketiga, sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; (2) transportasi dan pergudangan; (3) penyediaan akomodasi dan makan minum; (4) informasi dan komunikasi; (5) jasa keuangan; (6) real estate; (7) jasa perusahaan; (8) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (9) jasa pendidikan; (10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan (11) jasa lainnya.

Peran sektor primer sudah mengalami pergeseran ke arah sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer mempunyai peranan sebesar 13,16% lebih kecil dibandingkan dengan share sektor sekunder yang memberikan kontribusi sebesar 25,01% dan sektor tersier sebesar 61,83%.



Gambar III.20 Kerajinan, salah satu Pendongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Laju inflasi mengalami kenaikan dari 2,26% pada tahun 2016 menjadi 3,96% pada tahun 2017. Angka tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Kota Yogyakarta dan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laju inflasi nasional. Beberapa faktor pendorong inflasi di Kabupaten Bantul tahun 2017 adalah kenaikan tinggi beberapa jenis bahan makanan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, sayur-sayuran, gejolak pada bulan puasa dan hari raya yang berpengaruh pada inflasi bulan tersebut, kenaikan harga BBM, dan kelangkaan bahan bakar rumah tangga. Angka inflasi tersebut masih tergolong ke dalam inflasi ringan.

2. Indeks Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusidan ketimpangan pendapatan penduduk. Semakin tinggi rasio koefisien gini, semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat. Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan.

Penurunan ketimpangan pendapatan yang berhasil dicapai tahun 2017 mencapai 67,80% dari target, atau memiliki capaian kinerja Sedang. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah mencapai 63,60% dari target pemerataan pendapatan sebesar 0,3025.

Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 0,4126, lebih baik dibandingkan dengan capaian DIY (0,4400) dan nasional (0,3910). Capaian ini masih dalam batas kewajaran dan merupakan implikasi dari cepatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang digeluti oleh bukan mayoritas penduduk melampaui pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang digeluti mayoritas penduduk.

Trend capaian Indeks Gini dari tahun 2013 – 2017 sebagai berikut :



Sumber : BPS, 2018

Gambar III.21 Perkembangan Indeks Gini Tahun 2013 – 2017

Trend indeks gini dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indeks gini mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2017, hal ini beri ketimpangan pendapatan semakin tinggi atau distribusi pendapatan semakin tidak merata. Indeks Gini pada tahun 2016 sebesar 0,3967 dan pada tahun 2017, dengan faktor perkalian baru yang ditentukan oleh BPS Pusat, diprediksikan sebesar 0,4126.

Capaian ini masih dalam batas kewajaran dan merupakan implikasi dari cepatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang digeluti oleh bukan mayoritas penduduk. Capaian ini juga merupakan implikasi dari transformasi struktur ekonomi yang masih terus berproses dari sektor primer dan sekunder ke arah tersier.

Permasalahan pada sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan adalah kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan dikarenakan pengaruh ekonomi dunia. Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan peningkatan daya saing daerah, melalui penguatan produk lokal daerah; percepatan dan pemerataan investasi daerah serta peningkatan infrastruktur.

Upaya meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah, akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan..

Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain:

- a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
- b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
- c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat;
- d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
- e. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas. Pada tahun 2017, sebanyak 14 (empat belas) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
3. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
9. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
10. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
11. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
12. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
13. Program Pemberdayaan Pedagang
14. program kerjasama informasi dengan mas media

6. Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul

Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul merupakan penjabaran dari Misi 3 "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan".

Mengacu pada ukuran keberhasilan pariwisata dari Kementerian Pariwisata yang meliputi : jumlah kunjungan wisatawan, *length of stay* (LOS), dan belanja wisatawan. Ukuran ini digunakan pada tingkat nasional dan provinsi. Untuk Kabupaten Bantul, menggunakan "pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan" yang sesuai dengan standar nasional.

Tabel III.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	15	6	32,51	541,83	10	325,1

Sumber : Dinas Pariwisata, 2018, data diolah

Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul mengalami pencapaian kinerja Sangat Tinggi. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 ditargetkan sebesar 6% terealisir 32,51% atau 541,83%. Capaian ini menyumbangkan 325,1% dari target akhir RPJMD tahun 2021.

Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa-desa wisata.

Tabel III.15 Objek Wisata Kabupaten Bantul Tahun 2013- 2017

No.	Obyek Wisata	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
1	Alam	10	10	20	21	22	Pantai, goa, ekosistem bakau, gumuk pasir
2	Buatan	5	6	53	54	59	Taman rekreasi air, kolam renang, taman wisata agro, desa wisata
3	Sejarah, budaya	21	21	201	201	235	Warisan budaya, cagar budaya, desa budaya, wayang, benda purbakala, budaya Jawa, batik, alat tani tradisional, tokoh terkenal, koleksi penghayat kepercayaan
4	Museum	9	10	10	10	10	Museum Tani Candran Kebonagung Imogiri, Museum Batik Ciptowening Imogiri, Museum Geospasial Gumuk Pasir Parangtritis, Museum

No.	Obyek Wisata	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
							Budaya Jawa Tembi, Museum Wayang Kekayon, Museum Soeharto, Museum Maritim, Museum Garuda, Museum Tino Sidin, Museum Purbakala Pleret
5	Desa Wisata	33	34	36	37	38	16 dari 37 desa wisata yang ada sudah sering menerima kunjungan.

Sumber : Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan, 2018

Sejak tahun 2000, desa wisata di Kabupaten Bantul telah dibentuk. Sampai saat ini Desa Wisata di Bantul sebagai salah satu pengembangan destinasi wisata baru di Bantul sebanyak 38 desa wisata. Kecuali itu juga banyak adanya *homestay* yang juga mendukung kenaikan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2016 mencapai 2.356.578 orang menjadi 3.469.860 orang pada tahun 2017. Sedangkan jumlah PAD yang disumbangkan tahun 2012 sebesar Rp.8.640.795.116,00, meningkat menjadi Rp.17.090.253.000,00 pada tahun 2017. Peningkatan tersebut di atas didukung oleh promosi lewat media sosial dan kerjasama dengan pihak lain, juga didukung dengan desa-desa wisata di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan



Gambar III.22 *Fashion Street* di Srandakan

pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan.

Tahun ini banyak sekali even yang dilaksanakan untuk menaikkan jumlah kunjungan wisata, seperti adanya Jogya Air Show (JAS), Bantul Fashion Street, Lomba Kreativitas Seni yang diselenggarakan di Goa Selarong yang pada awalnya ditargetkan 100 peserta, ternyata melebihi sampai pada akhir pendaftaran mencapai 500 peserta yang tidak hanya berasal dari wilayah DIY tetapi sampai dengan Jawa Tengah. Selain itu kita juga mengadakan festival jatilan di Goa Selarong, lomba desa wisata, lomba pokdarwis dan lomba *homestay*. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, meningkatkan PAD serta peningkatan perekonomian masyarakat.

Tabel III.16 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata
Tahun 2011 – 2017

Tahun	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah PAD (Rp.)
2012	2.356.578	8.640.795.116,00
2013	2.153.404	9.120.764.368,00
2014	2.298.351	9.767.144.025,00
2015	2.500.114	11.150.632.500,00
2016	2.800.800	12.739.875.250,00
2017	3.711.384	17.090.253.000,00

Sumber : Dinas Pariwisata, 2018

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung akselerasi perekonomian Kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bantul yang dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Perkembangan dunia kepariwisataan Kabupaten Bantul yang cukup dinamis serta berkesinambungan diharapkan dapat memberikan peran yang lebih konstruktif dari sektor ini dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Bantul di masa mendatang.

Bantul meraih penghargaan sebagai Juara III Penghargaan Apresiasi Pesona Destinasi Indonesia "Desa Wisata Kaki Langit Mangunan", Juara II dalam Anugerah Pesona Indonesia "Surga Tersembunyi Terpopuler", Juara III dalam Anugerah Pesona Indonesia "Kampung Adat Terpopuler", Juara V dalam Lomba Homestay "Homestay Sahara", dan Juara V Lomba Pokdarwis "Pokdarwis Wukirsari".



Gambar III.23 Gejog Lesung di Desa Wisata Kaki Langit

Permasalahan :

1. Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona di setiap obyek wisata dan Pokdarwis di Kabupaten Bantul
2. Belum lengkapnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah
3. Belum optimalnya implementasi Sadar Wisata di masyarakat dan pelaku wisata
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana obyek wisata

Solusi :

1. Peningkatan sarana prasarana wisata dan penguatan kapasitas SDM serta lembaga pengelolaan obyek wisata
2. Penyusunan RDKP untuk 17 kecamatan dan RTOW untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kabupaten Bantul dalam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegratis
3. Pelaksanaan pembinaan kelompok Sadar Wisata dan masyarakat pelaku wisata secara kontinyu dengan memanfaatkan semua media

Strategi yang dilakukan untuk perbaikan kedepan adalah meningkatkan promosi Pariwisata dan pengelolaannya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait perwujudan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul. Pada tahun 2017, sebanyak 3 (tiga) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program pengembangan kemitraan

2. Program pengembangan destinasi pariwisata
3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

7. Sasaran Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas

Pengembangan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bantul memiliki industri kreatif yang beraneka ragam, sehingga menjadi kekuatan dan peluang dalam menghadapi persaingan dunia usaha semakin tinggi. Pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong pengembangan industri kreatif daerah secara lebih optimal guna meningkatkan daya saing daerah baik pada level nasional maupun internasional.

Sektor industri khususnya Industri kreatif memberikan peranan penting terhadap perekonomian suatu daerah. Peran industri kreatif bisa meningkatkan ekonomi secara global. Sebagian orang berpendapat bahwa kreativitas manusia adalah sumber daya ekonomi utama. Sehingga saat ini banyak sektor industri yang lahir dari kreatifitas dan inovasi dari setiap individu.

Tabel III.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Cakupan Industri Kreatif	39,95	30	41,11	137,03	50	82,22

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2018

Sasaran Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas mengalami pencapaian kinerja Sangat Tinggi. Capaian Cakupan Industri Kreatif Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 41,11% , meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 sebesar 39,95% dan melebihi target pada Tahun 2017 sebesar 30% (realisasi capaian 137,03%). Hal ini

menunjukkan bahwa 41,11% dari industri yang ada di Kabupaten Bantul merupakan industri kreatif. Selanjutnya pencapaian tersebut telah menyumbang 82,22% dari Target Capaian pada akhir RPJMD Tahun 2021 sebesar 50%.



Gambar III.24 Batik Kayu Krebet

industri khususnya pengembangan industri kreatif juga menjadi tolak ukur Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengembangan industri kreatif secara berkelanjutan. Pada Tahun 2017 Kabupaten Bantul telah ditetapkan oleh Badan Ekonomi Kreatif Nasional menjadi Kabupaten Kreatif Indonesia dengan basis Kriya.

Permasalahan :

Dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Bantul, permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan jenis industri kreatif yang baru difokuskan pada industri kreatif kerajinan/kriya, dari potensi 16 sub sektor industri kreatif.yang ada di Kabupaten Bantul.

Kemudian dikaitkan dengan pengembangan kewilayahan, sebaran industri kreatif di Kabupaten Bantul masih terpusat di daerah atau kawasan tertentu sehingga aspek pemerataan perekonomian daerah belum optimal.

Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif antara lain :

1. Mendorong penumbuhan sektor industri kreatif melalui pengembangan sub sektor industrif lainnya
2. Menguatkan komitmen dan keterpaduan serta kerjasama antar pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan industri kreatif
3. Pengembangan kewilayahan berbasis industri kreatif

Perkembangan industri kreatif yang demikian dicapai melalui beberapa strategi yaitu :

1. Menumbuhkan usaha pemula di sektor industri kreatif
2. Penguatan Industri Kreatif dengan melalui penguatan institusi yaitu, merumuskan kebijakan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif
3. Peningkatan apresiasi terhadap pelaku dan karya produk
4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta penguatan kelembagaan
5. Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang berkembangnya industri kreatif.

Implementasi strategi tersebut, pada tahun 2017 dan selanjutnya telah diprogramkan penumbuhan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, pelatihan, dan promosi

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait terciptanya industri kreatif yang berkualitas. Pada tahun 2017, sebanyak 5 (lima) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Potensi Energi
2. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
3. Program pengembangan industri kecil dan menengah
4. Program penataan struktur industri
5. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

8. Sasaran Terpenuhinya Ketahanan Pangan Masyarakat

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019, pembangunan sektor pertanian mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh

mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi.

Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, Kabupaten Bantul menempatkan pertanian dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan melalui sasaran terpenuhinya ketahanan pangan masyarakat merupakan pelaksanaan dari Misi 3 "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan".

Tabel III:18 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

Terpenuhinya Ketahanan Pangan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	4,24	0,6	20,52	3420	1	2052
2.	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,074	0,1010	0,1133	112,18	0,103	110
3.	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	14,09	1,025	36,974	3607,22	1,125	3286,58
4.	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,054	0,15	0,166	110,67	0,35	47,43

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2018, data diolah

1. Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)

Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas) menunjukkan keberhasilan, dimana pada tahun 2017 capaian kinerjanya tercapai 20,52% dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. Dari target 0,6%, realisasi tahun 2016 menunjukkan bahwa Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas) telah mencapai 3.607,22%. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 3.286,58% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang dapat diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Produksi daging pada tahun 2017 meningkat sebesar 20,52% dari sebesar 14.742,55 ton pada tahun 2016 menjadi 17.768,02 ton

Peningkatan produksi hasil peternakan menjadi sebuah tuntutan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Peningkatan produksi harus diikuti dengan peningkatan kualitas.



Gambar III.25 Launching Inseminasi Buatan oleh Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bupati Bantul Dalam Rangka Gebyar Upsus Siwab

2. Pertumbuhan produksi tanaman pangan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, produksi tanaman pangan merupakan penjumlahan dari produksi padi, jagung, kedelai yang merupakan tanaman pangan utama yang ada di Kabupaten

Bantul. Meskipun terdapat produksi tanaman pangan lain seperti kacang tanah dan ubi.

Pertumbuhan produksi tanaman pangan kinerjanya tercapai 112,18% dari target yang telah ditetapkan, masuk dalam kriteria kinerja Sangat Tinggi. Dari target 0,1010%, realisasi tahun 2017 menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi tanaman pangan mencapai 0,1133%. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 110 % dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Tabel III.19 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2015-2017

No.	Komoditas	Uraian	Tahun			Ket.
			2015	2016	2017*	
1	Padi Sawah	Luas Panen	29.522	29.944	30.376,4	ha
		Produktivitas (GKG)	67,22	61,11	62,60	ku/ha
		Produksi (GKG)	198.456	183.980	190.144	ton
		Produksi beras	125.424	116.275	119.790,67	ton
2	Padi Ladang	Luas Panen	120	65	45	ha
		Produktivitas (GKG)	57,08	35,54	39,21	ku/ha
		Produksi (GKG)	685	231	176	ton
		Produksi beras	433,92	145,99	111,16	ton
3	Padi	Luas Panen	29.642	30.009	30.421,4	ha
		Produktivitas (GKG)	67,18	61,05	62,56	ku/ha
		Produksi (GKG)	199.141	183.211	190.320	ton
		Produksi beras	125.857,11	116.421,35	119.901,83	Ton
4	Jagung	Luas Panen	4.312	3.647	3.379,5	ha
		Produksi (pipilan kering)	28.933	25.394	24.222	ton
		Produktivitas	67,1	69,63	71,67	ku/ha
5	Kedelai	Luas Panen	1.660	980,4	920,4	ha
		Produksi (wose kering)	2.784	1.262	1.325	ton
		Produktivitas	16,77	12,87	14.39	ku/ha

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2018

Pada tahun 2017 terjadi kenaikan luas panen padi sebesar 1,37% atau 412,4 ha, dan produksi padi mengalami kenaikan sebesar 3,88% atau 7.109 ton dibandingkan tahun 2016. Kenaikan produksi padi tahun 2017 ini disebabkan kenaikan produktivitas sebesar 2,47%.

Upaya yang dilakukan demi peningkatan produktivitas ini diantaranya dengan penyediaan berbagai prasarana dan sarana pertanian (seperti pembangunan saluran irigasi), pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani mulai dari on farm sampai dengan *off farm*, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pengendalian hama dan organisme penggangu tanaman (OPT).

Selain itu, dukungan terhadap penyediaan benih berkualitas senantiasa dilakukan oleh UPT Balai Benih Pertanian (BBP). Pada tahun 2017, UPT BBP mampu memproduksi benih padi sebanyak 199.065 kg atau 199,065 ton terdiri dari benih dasar (BD) dan benih pokok (BP), benih yang siap dipasarkan, sebagai berikut :

Tabel III.20 Produksi Benih Padi UPT BBP Tahun 2017

No	Varieatas	Jumlah Produksi (ton)		
		BD	BP	Total
1	Situ Bagendit	0,885	48,920	49,805
2	Mekongga	1,305	33,725	35,030
3	Ciherang	0,230	27,480	27,710
4	Pepe	1,775	44,440	46,215
5	Code	0,320	19,440	19,760
6	Logawa	0,615	10,120	10,735
7	Inpari 23	0	2,720	2,720
8	Inpari 24	0,210	6,880	7,090
Total (ton)		5,340	193,725	199,065

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2018

Pada tahun 2017 terdapat 9 kelompok penangkar benih padi. Total luasan yang dikelola oleh kelompok penangkar seluas 27,42 ha, yang merupakan total luasan dalam satu kali musim tanam. Kelompok agribisnis penangkar yang bekerjasama dengan UPT Balai Benih Pertanian melakukan tanam benih padi tiga kali dalam setahun.

Beberapa wilayah pertanian di Kabupaten Bantul, mulai menerapkan sistem tanam jajar legowo guna mendapatkan produktivitas padi yang tinggi. Secara teknis, sistem itu akan meningkatkan populasi tanaman dengan mengatur jarak tanam sehingga pertanaman akan memiliki barisan tanaman yang diselingi barisan kosong. Dengan sistem tajarwo itu, kproduktivitas meningkat dalam satu hektar bisa menghasilkan produktivitas gabah 9,7 ton, di atas rata-rata sistem biasa yang sekitar 7-8 ton per hektare.



Gambar III.26 Sekretaris Daerah, Drs. Riyantono, M.Si melakukan Penanaman Padi melalui Tanam Jajar Legowo (Tajarwo) Super dalam Gerakan Tanam Padi di Bantul

Pola tanam jajar legowo adalah salah satu rekomendasi yang terdapat dalam paket anjuran Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) guna menambah populasi tanaman hingga 30 persen. Pola tersebut yang system tanamnya 2:1 atau 4:1 memungkinkan sinar matahari merata di semua tanaman padi, sehingga hasilnya akan meningkat

Pada tanggal 14 Desember 2017, Inovasi dan Teknologi SIPERKASA (Sistem Penjemuran Karya Santoso) yang dikembangkan oleh Kepala UPT BBP (Budi Santoso, SP., MMA.) mendapatkan piagam penghargaan dari Bupati Bantul dan masuk 10 TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK. Inovasi ini juga berkesempatan mengikuti pameran di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta. SIPERKASA ini bisa diaplikasikan oleh para petani dalam menangani masalah pascapanen khususnya dalam penjemuran karena alat ini fleksibel, efektif, efisien dan ekonomis. Sistem ini bisa diterapkan di mana saja baik di halaman rumah, pekarangan, di sawah, di kebun sehingga petani dalam menjemur tidak di jalan umum yang tentunya mengganggu kepentingan umum. Bahan bakunya pun mudah didapatkan dari lingkungan sekitar.



Gambar III.27 Inovasi SIPERKASA pada Pameran Inovasi di Lembaga Administrasi Negara

Selain tanaman padi, komoditas yang termasuk tanaman pangan adalah palawija. Palawija unggulan Kabupaten Bantul antara lain jagung, kacang tanah, dan kedelai. Produksi jagung pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 4,61% atau 1.172 ton dibandingkan tahun 2016, sedangkan produktivitasnya mengalami kenaikan sebesar 2,92% atau 2,04 ku/ha. Penurunan produksi jagung disebabkan penurunan luas panen sebesar 7,33% karena dampak siklon cempaka yang terjadi pada akhir bulan November. Seluas 14 Ha tanaman jagung pada lahan inundasi (bantaran sungai) di wilayah Seloharjo, Pundong mengalami puso dan gagal panen. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir dan lahan jagung tergenang air. Lahan jagung yang terendam lebih dari empat jam akan menyebabkan tanaman jagung mati, sehingga terjadi panen muda atau bahkan gagal panen.

Pada tahun 2017 produksi kacang tanah mengalami penurunan sebesar 11,13% atau 384 ton dibandingkan tahun 2016. Penurunan produksi ini disebabkan oleh penurunan luas panen sebesar 13,13% atau 889 Ha. Hujan tinggi masih menjadi penyebab penurunan produksi kacang tanah ini. Pengisian polong pada saat hujan tidak terjadi secara maksimal sehingga panen muda dan produksi rendah. Lain halnya dengan kedelai, pada tahun 2017 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Kenaikan produksi kedelai mencapai 4,99% atau 63 ton.

Meskipun luas panen mengalami penurunan sebesar 6,12%, produktifitas mengalami kenaikan sebesar 11,8% sehingga mampu mendongkrak peningkatan produksi.

3. Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura

Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura menunjukkan keberhasilan, dimana pada tahun 2017 capaian kinerjanya tercapai 3.607,22% dari target yang telah ditetapkan, masuk dalam kriteria kinerja Sangat Tinggi. Dari target 1,025%, realisasi tahun 2017 menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi tanaman hortikultura mencapai 36,974%. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 3.286,58% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Bantul antara lain bawang merah, cabai merah, dan pisang. Data luas panen, produksi dan produktivitas tanaman hortikultura sebagai berikut :

Tabel III.21 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Tahun 2015-2017

No.	Komoditas	Uraian	Tahun			Ket
			2015	2016	2017*	
1	Bawang Merah	Luas Panen	584	768	758	Ha
		Produksi	4.501,9	7.904,73	8.465	Ton
		Produktivitas	7,71	10,29	11,17	ton/ha
2	Cabai Merah	Luas Panen	469	116	366	Ha
		Produksi	1.825,3	409,25	1.341,2	Ton
		Produktivitas	38,9	35,28	36,65	Ton/ha
3	Pisang	Tanaman menghasilkan	655.572	658.690		pohon
		Produksi	103.207	106.708	161.977	Ku
		Produktivitas	0,160	0,162		ku/pohon

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2018

Bawang merah mengalami peningkatan produksi sebesar 7,09% atau 560,27 ton dibandingkan produksi tahun 2016. Kenaikan produksi ini terjadi karena terdapat peningkatan produktifitas sebesar 8,55%.

Produksi cabai merah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 227,72 % dari 116 ton pada tahun 2016 menjadi 366 ton pada tahun 2017.

Peningkatan produksi ini disebabkan peningkatan luas panen dan produktifitas masing-masing sebesar 215,52% dan 3,88%.



Gambar III.28 Festival Pisang dalam Rangka Mendukung
Peningkatan Produksi Hortikultura

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura tersebut ditempuh dengan penerapan *Good Agricultural Practices (GAP)*. Pelatihan GAP telah dilaksanakan baik GAP Sayur maupun GAP buah. Pelatihan GAP sayur dilaksanakan di kantor Balai Pelaksana Penyuluhan (BPP) Bambanglipiro dan BPP Sewon, sedangkan GAP buah dilaksanakan di Kelompok Tani Kediwung, dan Kelompok Tani Sukorame, Mangunan Dlingo.

4. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan

Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan kinerjanya tercapai 110,67% dari target yang telah ditetapkan, masuk dalam kriteria kinerja Sangat Tinggi. Dari target 0,15%, realisasi tahun 2017 menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi tanaman hortikultura mencapai 0,166%. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 47,43% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, mete, tebu dan kelapa. Pada tahun 2017 produksi tembakau

mengalami kenaikan sebesar 197,41% atau 2.020,5 ku, dengan kenaikan produktivitas sebesar 61,84% atau 3,68 ku/ha dibanding tahun 2016.

**Tabel III.22 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Tahun 2016-2017**

No.	Komoditas	Uraian	Tahun		Ket.
			2016	2017*	
1	Tembakau Rakyat	Luas Panen	172,00	316,00	ha
		Produksi	1.023,50	3.044	ku (rajang kering)
		Produktivitas	5,95	9,63	ku/ha (rajang kering)
2	Mete	Luas Panen	112,70	119,80	ha
		Produksi	34,29	134,40	ku (glondong krg)
		Produktivitas	0,30	0,76	ku/ha (glondong krg)
3	Tebu	Luas Panen	1.174,32	1.207,69	ha
		Produksi	41.021,95	29.186,75	ku (hablur)
		Produktivitas	34,93	26,76	ku/ha (hablur)
4	Kelapa	Luas Panen	7.064,07	10.464,73	ha
		Produksi	102.622	112.677	ku (kopra)
		Produktivitas	14,53	15,87	ku/ha (kopra)

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2018

Produksi tebu tahun 2017 menurun 28,85% atau 11.835,25 ku dibanding tahun 2016 karena terjadi hujan tinggi sehingga produktifitas juga menurun 23,39% dari 34,93 ku/ha menjadi 26,76 ku/ha. Hujan yang tinggi menyebabkan penurunan rendemen tebu. Penurunan rendemen tebu ini terjadi tidak hanya di Bantul, akan tetapi juga terjadi di seluruh Indonesia.

Produksi kelapa meningkat sebanyak 9,79% atau 10.055 ku. Produktifitas kelapa juga meningkat 9,25% atau 1,344 ku/ha karena cuaca optimal untuk pertumbuhan kelapa.

Permasalahan :

1. Penurunan kesuburan tanah akibat pemakaian pupuk kimiawi berlebihan.
2. Rendahnya Tingkat penerapan teknologi pertanian anjuran.
3. Penurunan kondisi infrastruktur pertanian.
4. Alih fungsi lahan pertanian.
5. Belum optimalnya penanganan pasca panen.
6. Manajemen pengelolaan peternakan belum optimal.
7. Rendahnya minat generasi muda dalam pembangunan bidang pertanian

Solusi :

1. Gerakan penggunaan pupuk berimbang, program optimasi lahan dan program SRI dan konservasi lahan, serta penggunaan pupuk organik.
2. Pendampingan kepada kelompok tani, demplot, pelatihan dan sekolah lapangan.
3. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang telah rusak.
4. Percepatan Perda LP2B dan sertifikasi gratis lahan pertanian.
5. Pelatihan penanganan pasca panen, program pengolahan hasil, promosi, dan *labelling*.
6. Optimalisasi pengelolaan peternakan.
7. Sosialisasi dan pembentukan Taruna Tani serta pengembangan pertanian berbasis wisata dan edukasi serta penggunaan teknologi pertanian untuk menarik minat generasi muda

Strategi kedepan guna meningkatkan capaian indikator di atas, diupayakan dengan beberapa hal antara lain :

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan melalui kegiatan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman baik pertanian, hortikultura maupun perkebunan.
2. Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui berbagai kegiatan peningkatan agribisnis pertanian seperti pameran dan promosi produk pertanian melalui pasar tani, Bantul Ekspo, pameran tingkat kecamatan, berbagai pelatihan pasca panen dan pengolahan produk pertanian



Gambar III.29 Pasar Tani Kabupaten Bantul Dukung Pemasaran dan Promosi Produk Pertanian

3. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan pada kelompok tani serta penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian seperti pembuatan dan perbaikan jaringan irigasi, pembuatan embung dan sumber air tanah dangkal dan dalam.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait terpenuhinya ketahanan pangan masyarakat. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
4. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
7. Program peningkatan produksi hasil peternakan
8. Program peningkatan produksi peternakan

9. Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan dijabarkan dalam tiga misi, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul mendapatkan perhatian yang khusus terkait dengan perubahan paradigma yang telah digaungkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu menjadikan pantai selatan sebagai beranda depan DIY dengan paradigma Among Tani Dagang Layar. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh dalam meningkatkan produksi kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

Tabel III.23 Rencana dan Realisasi Capaian Sarasan Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan produksi perikanan	0,697	1,30	5,92	455,38	1,5	394,67

Sumber : Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2018

Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat tahun 2017 capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang Sangat Tinggi, dari target 1,30% terealisir 5,92% atau tercapai 455,38%. Capaian ini juga menyumbangkan sebanyak 394,67% dari target akhir RPJMD tahun 2021. Produksi perikanan tahun 2017 mengalami kenaikan 5,92% dari produksi tahun 2016, yaitu sebanyak 12.191.224 ton menjadi 12.912.586 ton. Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, sebagai berikut :

a. Produksi perikanan budidaya

Pada tahun 2017 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 5,84% dari 11.363.724 kg pada tahun 2016 menjadi 12.027.236kg pada tahun 2017. Perikanan budidaya yang telah dikembangkan terdiri dari berbagai macam jenis ikan, sebagaimana berikut

Tabel III.24 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan Tahun 2015 – 2017

No.	Jenis Ikan	Produksi (kg)		
		2015	2016	2017
1	Gurami	2.038.280	1.860.867	2.028.830
2	Nila	2.231.763	1.924.565	2.114.000
3	Lele	6.106.252	6.738.202	7.094.430
4	Bawal	218.462	258.883	282.250
5	Patin	95.597	40.150	29.370
6	Mas	24.268	34.018	37.450
7	Udang vaname	650.602	507.038	440.890
Jumlah		11.365.224	11.363.724	12.027.236

Sumber : Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2018

Kenaikan ini disebabkan adanya introduksi teknologi baru yaitu budidaya ikan hemat lahan dan air (MATLAIR). Dengan lahan yang terbatas dan padat tebar tinggi, mampu meningkatkan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bantul.

b. Produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap tahun 2017 sebesar 885,35 ton mengalami kenaikan 6,99% dibanding tahun 2016. Selengkapnya, produksi perikanan tangkap tahun 2015-2017 disajikan sebagai berikut :

Tabel III.25 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2015-2017

No.	Uraian	Jumlah (ton)		
		2015	2016	2017
1	Produksi tangkap laut	391,37	462,30	624,75
3	Produksi tangkap perairan umum	349,23	365,20	260,60
Jumlah		741,60	827,50	885,35

Sumber : Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2018

Kenaikan ini didukung oleh :

1. Pembinaan dan pendampingan yang intensif dari penyuluhan dan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan;
2. Fasilitasi berbagai bantuan baik berupa alat penangkapan ikan, kapal penangkap ikan serta pinjaman modal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kondisi cuaca wilayah di Pantai Perairan Laut WPP 573 yang kondusif bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan dan didukung potensi ikan yang besar sehingga produksi perikanan tangkap laut meningkat.



Gambar III.30 Penyerahan Bantuan Kapal secara Simbolis oleh Direktur Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan

Dalam pencapaian peningkatan pertumbuhan produksi perikanan berhasil memberikan satu prestasi berupa Juara I Tingkat Nasional Penghargaan atas Evaluasi Kinerja Tenaga Pendamping Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) atas nama Fakhrudin Al Rozi, S.Pi. LPMUKP merupakan satuan kerja Kementerian Kelautan

dan Perikanan yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tugas utamanya menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan kepada usaha kecil mikro dan menengah kelautan dan perikanan

Permasalahan :

1. Konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah
2. Rendahnya minat generasi muda dalam usaha di bidang kelautan dan perikanan
3. Rendahnya daya saing produk perikanan

Solusi :

1. Melaksanakan kampanye "Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)"
2. Melaksanakan sosialisasi/kampanye wirausaha perikanan budidaya serta menciptakan kader-kader nelayan baru dengan mengadakan pelatihan dan magang di kapal.
3. Meningkatkan daya saing produk perikanan dengan melaksanakan :
 - a. Introduksi teknologi budidaya ikan padat tebar hemat lahan dan air (MATLAIR).
 - b. Meningkatkan pemahaman kepada para pelaku usaha perikanan tentang *food safety* melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Pemberian Ikan yang Baik dan Cara Penanganan Ikan yang Baik.
 - c. Fasilitasi akses permodalan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.
 - d. Perluasan jaringan pemasaran melalui pembentukan Asosiasi Pengolah dan Pemasar Perikanan Kabupaten Bantul 'Projo Mino', pembangunan sentra pemasaran bidang pengolahan dan kuliner, serta peningkatan partisipasi perikanan pada kegiatan pameran baik lokal maupun regional untuk mengenalkan produk perikanan.
 - e. Mempermudah akses informasi kondisi cuaca dan iklim bagi para nelayan.
 - f. Meningkatkan kemampuan nelayan dan sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk menangkap ikan di jalur penangkapan ikan II dan III

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pertumbuhan produksi perikanan. Pada tahun 2017, sebanyak 3 (tiga) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari :

1. Program pengembangan budidaya perikanan
2. Program pengembangan perikanan tangkap
3. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

10. Sasaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat

Kualitas pembangunan daerah salah satunya didorong oleh pembangunan infrastruktur, karena kondisi infrastruktur merupakan faktor utama/penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Bantul, pembangunan infrastruktur diorientasikan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah. Tujuan dari pembangunan infrastruktur ini adalah agar seluruh wilayah kabupaten dapat terakses secara baik sehingga sumber-sumber ekonomi dan modal sosial lainnya dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dilaksanakannya pembangunan infrastruktur ini adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan infrastruktur dasar. Untuk melakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, akan dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

Tabel III.26 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	-	72	71,57	99,4	80	89,46

Sumber : Bappeda, 2018

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat yang diukur melalui IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur (IKLI) menunjukkan angka yang baik, di mana pada tahun 2017 capaian kinerjanya sebesar 99,40% dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. Dari target 72, realisasi tahun 2017 menunjukkan bahwa IKLI telah mencapai 71,57. Pencapaian ini belum dapat dibandingkan, karena pada tahun sebelumnya belum dilakukan survei IKLI. Kemudian pencapaian ini menyumbangkan sebesar 89,46% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang dapat diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Penentuan IKLI didasarkan pada kepuasan pelayanan infrastruktur sesuai 4 (empat) IKU OPD dalam RPJM Kabupaten Bantul 2016-2021, yaitu:kondisi jalan kabupaten; kondisi gedung pemerintah; kondisi infrastruktur kawasan kumuh perkotaan; dan infrastruktur irigasi.

Tabel III.27 Nilai Indeks Pelayanan Infrastruktur Gabungan

No	IKU OPD	Indeks Pelayanan Infrastruktur	Indeks Pelayanan Konversi	Mutu Pelayanan Infrastruktur	Kinerja Pelayanan
1	Kondisi jalan kabupaten	2,47	61,77	C	Kurang Baik
2	Kondisi gedung pemerintah	3,20	80,00	B	Baik
3	Kondisi infrastruktur kawasan kumuh perkotaan	3,08	77,11	B	Baik
4	Kondisi infrastruktur irigasi	2,70	67,40	B	Baik
Indeks Gabungan		2,86	71,57	B	Baik

Sumber : Bappeda, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa mutu pelayanan infrastruktur gedung pemerintah, kawasan kumuh perkotaan, dan irigasi berada pada kategori 'B' dengan kinerja pelayanan 'Baik'; sedangkan mutu pelayanan infrastruktur jalan kabupaten berada pada kategori 'C' (kinerja pelayanan 'Kurang Baik'). Mutu pelayanan infrastruktur gabungan di Kabupaten Bantul secara umum berada pada kategori 'B' dengan kinerja pelayanan 'Baik'.

1. Kondisi Jalan Kabupaten

Hasil penilaian kepuasan layanan infrastruktur jalan kabupaten menunjukkan bahwa nilai indeks pelayanan unsur fasilitas penunjang jalan kabupaten) mempunyai nilai pelayanan paling kecil. Data kondisi jalan kabupaten beraspal

pada tahun 2017 sepanjang 452,10 km atau 74,18% berada dalam kondisi mantap, sedangkan 157,34 km atau 25,82% dalam kondisi belum mantap dari panjang total panjang jalan kabupaten sepanjang 609,440km. Sedangkan kondisi jalan perdesaan sebagai salah satu sarana dan prasarana dasar belum sepenuhnya dalam kondisi mantap. Pada tahun 2017 terealisasi 31,719 km dari jalan desa di Kabupaten Bantul sepanjang 164,47 km. termasuk di dalamnya adalah upaya yang dilakukan untuk mempercantik dan menata kawasan Jalan jenderal Sudirman sebagai pusat perekonomian dan aktivitas massal di pusat kota Bantul.



Gambar III.31 Wajah Baru Kawasan Jalan Jend. Sudirman

2. Kondisi Gedung Pemerintah

Secara umum kondisi infrastruktur gedung pemerintah di Kabupaten Bantul dalam kondisi baik. Dari hasil survei IKLI infrastruktur gedung kantor mendapatkan nilai 80,00 dengan kinerja pelayanan "baik". Namun demikian perlu adanya peningkatan infrastruktur gedung pemerintah terutama rehabilitasi beberapa gedung yang kondisinya masih kurang memadai. Gedung yang dimaksud adalah gedung kantor seluruh OPD di Kabupaten bantul, tidak termasuk gedung sekolah maupun puskesmas.

3. Kawasan Kumuh

Kondisi infrastruktur kawasan kumuh perkotaan mendapatkan nilai IKLI sebesar 77,11 dengan kinerja pelayanan "baik". Data kawasan kumuh perkotaan tertangani pada tahun 2017 adalah 76,69 % dari target akhir RPJMD yaitu 79,69%. Atau sekitar 21,75 Ha dari keseluruhan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bantul yaitu

27,29 Ha pada tahun 2017 (berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati No. 364 tahun 2014).

Dalam rangka mengurangi dan mengatasi kawasan permukaan kumuh di wilayah perkotaan telah dibangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang berasal anggaran APBN. Sampai dengan tahun 2017 terdapat 4 Rusunawa yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan (Pringgolan) dan Rusunawa Tamanan.

Sedangkan untuk memenuhi layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dilaksanakan bantuan stimulan pembangunan swadaya yang selama ini mendapat anggaran dari pemerintah pusat/provinsi. Pada tahun 2017, rumah tidak layak huni dapat tertangani 557 unit dari dana BKK Propinsi DIY

4. Jaringan Irigasi

Kondisi infrastruktur irigasi mendapat nilai 67,40 dengan kinerja pelayanan "baik". Kondisi infrastruktur irigasi dibagi dalam beberapa unsur yaitu ketersediaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi, kecukupan kebutuhan air irigasi, pemerataan/distribusi air irigasi, keandalan/kontinuitas air irigasi, serta partisipasi petani pengguna air (P3A) dalam pemeliharaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi.

Permasalahan :

1. Curah hujan yang sangat tinggi (bencana banjir) pada akhir tahun menyebabkan kerusakan infrastruktur terutama jaringan jalan dan jaringan irigasi.
2. Kerusakan jalan akibat tonase kendaraan tidak sesuai dengan kelas jalan yang ada di Kabupaten Bantul terutama di jalur jalur penambangan galian C.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga infrastruktur yang ada
4. Pembangunan infrastruktur oleh pihak ketiga belum spenuhnya sesuai dengan kualitas yang ditentukan
5. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sehingga tidak bisa menjangkau seluruh kerusakan yang ada

Solusi :

1. Prioritas pembangunan infrastruktur untuk penanganan dampak banjir.
2. Mengarahkan jalur lalulintas angkutan bahan galian C sesuai klasifikasi jalan.

3. Sosialisasi pada masyarakat untuk ikut menjaga kondisi infrastruktur yang ada
4. Perlunya pembinaan dan peningkatan sumber daya pelaku jasa konstruksi serta pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan.
5. Koordinasi dengan instansi/ pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur

Strategi kedepan guna meningkatkan capaian indikator di atas, diupayakan dengan beberapa hal antara lain :

1. Meningkatkan ketercukupan jumlah jalan kabupaten, meningkatkan kenyamanan jalan kabupaten, peningkatan kondisi dan kualitas jalan kabupaten, dan terutama pada fasilitas penunjang jalan kabupaten (PJU, trotoar, marka, drainase jalan).
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah (IPAL, MCK), pelayanan air bersih (PDAM, SPAM, SIPAS), prasarana dan sarana layanan persampahan (TPS, TPS-3R, bank sampah), dan peningkatan jalan lingkungan. Ketersediaan saluran air hujan/drainase/biopori dan ketersediaan ruang terbuka hijau (taman, makam, ruang publik) akan ditingkatkan.
3. Meningkatkan ketersediaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi, kecukupan kebutuhan air irigasi, pemerataan/distribusi air irigasi, keandalan/kontinuitas air irigasi; partisipasi petani pengguna air (P3A) dalam pemeliharaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat. Sebanyak 16 (enam belas) program dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
4. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
6. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
7. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
8. Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

9. Program Pengembangan Perumahan
10. Program pengelolaan areal pemakaman
11. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
12. Pogram peningkatan pelayanan angkutan
13. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
14. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
15. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
16. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 17.

11. Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Sasaran terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas merupakan pelaksanaan Misi 4, yaitu "Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana".

Tabel III.28 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	47,53	45	45,1	100,22	72	62,64

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup,, 2018

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan keberhasilan, dimana pada tahun 2017 capaian kinerjanya tercapai 100,22% dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. Dari target 45%, realisasi tahun 2017 menunjukkan bahwa IKLH telah mencapai 45,1%. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 62,64% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang dapat diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Kerangka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi oleh KLH adalah yang dikembangkan oleh *Virginia Commonwealth University* (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan sebagai indikator. Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2017 terealisir 31,33 dari target 35, Indeks Kualitas Udara

(IKUd) terealisir 82,31 dari target sebesar 60, sedangkan Indek Tutupan Lahan terealisir 27,07 dari target 33,85.



Gambar III.32 Bersih-bersih Sungai dalam rangka mewujudkan
Bantul Bersih Sampah Tahun 2019

Kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 belum cukup baik, dimana dari data status mutu air sungai tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan mayoritas air sungai di Kabupaten Bantul berstatus Sedang, akan tetapi kriteria penilaian prestasi kinerja masih tinggi. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat Kabupaten Bantul secara geografis terletak di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga secara alami Kabupaten Bantul merupakan daerah hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum seluruhnya memenuhi baku mutu. Tingginya konsentrasi Fecal Coli dan Total Coli pada air sungai di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan tidak melakukan BAB di sungai masih cukup rendah. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu.

Faktor-faktor penghambat ini diharapkan dapat tertangani pada tahun berikutnya dengan menetapkan strategi berupa pemantapan fungsi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha agar mengolah limbahnya hingga memenuhi baku mutu dan menggalakkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Selain itu, Bantul juga melakukan Gerakan Gropyok Sampah. Selain untuk mewujudkan Bantul yang bersih indah nyaman dan akan mengundang wisatawan untuk berkunjung ke Bantul, Gerakan *gropyokan* sampah ini diharapkan akan memotivasi masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk berbuat yang sama, dan harapannya sebagai kebiasaan atau habit warga masyarakat Bantul.



Gambar III.33 Bapak Wakil Bupati, Abdul Halim Muslih memimpin Gerakan *Gropyok Sampah* di Sepanjang Pantai Selatan Bantul

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul telah melebihi target kinerja pada Tahun 2017 sebesar 60. Selain itu, kualitas udara ambient Kabupaten Bantul juga masih baik, ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas udara ambien Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 82,31 yang relatif tinggi jika dibandingkan nilai indeks kualitas udara yang bisa dicapai yaitu sebesar 105,56 yang bisa dicapai hanya jika tidak ada lagi pencemar NO₂ dan SO₂ di udara ambien. Salah satu penyebab tidak langsung terjadinya penurunan kualitas udara adalah bertambahnya jumlah penduduk. Semakin bertambah jumlah penduduk, semakin meningkat kebutuhan energi. Selain kebutuhan listrik yang melonjak, kebutuhan akan bahan bakar seperti solar pun ikut melonjak untuk industri dan transportasi. Pertumbuhan industri bergerak secara paralel dengan pertumbuhan pemanfaatan bahan bakar minyak untuk transportasi. Namun ternyata pemanfaatan batubara dan solar (bahan bakar fosil) sebagai sumber energi pembangkit listrik dan transportasi juga membawa dampak negatif yang mempengaruhi kualitas udara. Pencemaran udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran, termasuk bahan bakar fosil adalah nitrogen oksida (NO_x), karbon

monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5) dan hidrokarbon (HC).

Laju penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang bermanfaat sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota) dan pembersih udara yang efektif di Kabupaten Bantul belum dapat mengimbangi laju penambahan volume kendaraan sehingga kualitas udara di Kabupaten Bantul justru semakin menurun. Terlebih lagi RTH publik eksisting kawasan perkotaan Kabupaten Bantul sebesar 1.714 ha (13,8%) belum mencukupi kebutuhan RTH publik berdasarkan 20% dari luas kawasan perkotaan dengan kekurangan sebesar 770,2 ha (Bappeda Kabupaten Bantul, 2014).

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio - kultural, dan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup. Kawasan strategis lingkungan hidup kabupaten meliputi :

1. Kawasan Strategis Agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropolitan di Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan
2. Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.



Gambar III.34 Sawah Sukorame Mangunan Dlingo sebagai Wisata Sawah yang Asri

Penambahan tutupan lahan dilakukan dalam rangka pengelolaan hutan dan lahan kritis telah dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan yang, sehingga lahan kritis berubah menjadi lahan yang lebih produktif. Penambahan tutupan lahan dilakukan melalui kegiatan penanaman tanaman buah (alpukat, sirsak, durian, kelengkeng dan rambutan) di lahan kritis Dusun Nawungan Desa Selopamioro Imogiri seluas 35 hektar, penanaman tanaman buah (jambu biji, sirsak, mangga, srikaya dan durian) di lahan kritis Desa Seloharjo Pundong seluas 7 hektar, dan Desa Dlingo Kec. Dlingo seluas 4 hektar. Penambahan tutupan lahan pada tahun 2017 antara lain berasal dari penanaman pohon mangga, beringin, keben dan sawo kecil sebanyak 5.650 batang yang tersebar di wilayah Kecamatan Piyungan, Pundong, Dlingo, Banguntapan, Imogiri, dan Pajangan. Selain itu juga berasal dari pembangunan Taman Kota di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bantul. Dengan ada penambahan tutupan lahan sebesar 0,03651 km² pada tahun 2017, maka total luas tutupan lahan Kabupaten Bantul hingga tahun 2017 menjadi 28,25 km².

Indeks tutupan lahan Kabupaten Bantul tahun 2017 adalah sebesar 27,51 atau naik sebesar 0,01 dibandingkan dengan tahun 2016. Capaian ini masih jauh dari target sebesar 33,85 atau dengan kata lain target indeks tutupan lahan tahun 2017 tidak tercapai.

Permasalahan :

1. Lokasi sungai di wilayah Bantul yang berada di hilir sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu. Selain itu, kesadaran pelaku usaha yang masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu.
2. Terbatasnya lahan yang dapat ditanamani ataupun dijadikan RTH-taman (Kas Desa, Tanah Pemda), selain itu juga karena lahan kritis bekas tambang biasanya merupakan tanah hak milik pribadi sehingga tidak dapat melakukan penanaman di lokasi tersebut;
3. Bantuan bibit yang seyogyanya diperuntukkan untuk penghijauan sempadan sungai, namun ditanam di pekarangan rumah oleh masyarakat

Solusi :

1. Pemantapan fungsi pengawasan DLH terhadap pelaku usaha agar mengolah limbahnya hingga memenuhi baku mutu.
2. Sosialisasi kepada masyarakat agar bersedia melakukan penghijauan lahan milik mereka secara mandiri dan menggunakan bantuan bibit sesuai peruntukannya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas. Pada tahun 2017, sebanyak 5 (lima) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, terdiri dari :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

12. Sasaran Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Aspek pentingnya adalah bukan hanya penanganan kedaruratan, namun juga pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan.

Kabupaten Bantul berada dalam rawan bencana dengan resiko bencana tinggi dan pernah mengalami bencana yang cukup parah. Terkait dengan itu, dituangkan dalam RPJMD dan misi Bupati. Indikator ini spesialistik.

Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mengantisipasi timbulnya bencana sesuai dengan sistem manajemen bencana melalui pengembangan regulasi yang memadai, perencanaan dan penganggaran, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang dulu berpola responsif-tanggap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Di tingkat masyarakat, upaya membangun kesiapsiagaan juga dilakukan dengan mengembangkan desa tangguh bencana, desa siaga bencana dan sekolah siaga bencana. Hal ini menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan dukungan yang memadai baik untuk mengantisipasi kejadian bencana atau memulihkan kehidupan apabila terjadi bencana.

Tabel III.29 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Desa Tangguh Bencana	20	22,66	29,33	129,45	33,34	87,98

Sumber : BPBD, 2018

Sasaran meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tercapai Sangat Tinggi. Hal ini dilihat dari indikator persentase desa tangguh bencana yang tercapai 29,33% dari target 22,66% atau nilai capaian 129,45%. Capaian ini menyumbangkan 87,89 % dari target akhir RPJMD tahun 2021 sebanyak 87,98% desa tangguh bencana.

Desa tangguh bencana yang terealisir sampai dengan tahun 2016 sebanyak 22 (dua puluh dua) desa dari 75 (tujuh puluh lima) desa yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu Desa Wonolelo, Mulyodadi, Tirtohargo, Gadingharjo, Gadingsari, Poncosari, Srimulyo, Mangunan, Jatimulyo, Wukirsari, Kebonagung, Parangtritis, Srigading, Seloharjo, Selopamioro, Munthuk, Karangtengah, Girirejo, Imogiri, Trimulyo, Sriharjo, Srimartani. Sedangkan Sekolah Siaga Bencana sebanyak 10 (sepuluh) sekolah, yaitu SD Parangtritis, SD Ar Raihan, SMP 2 Imogiri, SMA 1 Kretek, SMA 1 Bantul, SMA 2 Bantul SMK Kelautan Bantul, SD 1 Tirienggo, SMP 1 Pandak dan SMP 2 Dlingo.

Upaya merintis desa tangguh bencana dilakukan secara terus menerus dan memperhatikan banyak faktor kesiapan masing-masing desa. Desa tangguh bencana dirintis kerja sama langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Desa tangguh bencana menuntut kesadaran masyarakat tentang perilaku menyelamatkan keluarga saat terjadi bencana.

Wilayah Kabupaten Bantul termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana. Bencana yang terjadi hampir setiap tahun di adalah banjir, tanah longsor, angin ribut, kebakaran, abrasi dan erosi. Dari seluruh kejadian bencana di Kabupaten Bantul, yang paling menonjol adalah tanah longsor, angin ribut dan kebakaran.

Tabel III.30 Potensi Bencana di Kabupaten Bantul

No.	Jenis Bencana	Lokasi yang berpotensi
1	Tanah longsor	Dlingo, Imogiri, Kasihan, Pajangan, Piyungan, Pleret, Pindong, Sedayu, Sewon
2	Angin kencang	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
3	Kekeringan	Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, Pundong
4	Banjir	Imogiri, Pajangan, Pleret, Sewon, Banguntapan, Jetis, Kasihan, Piyungan, Pundong, Kretek, Pandak, Srandakan, Bantul
5	Gempa bumi	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
7	Tsunami	Srandakan, Kretek, Sanden
8	Abrasi/Erosi	Kretek, Imogiri, Banguntapan, Kasihan, Pleret, Sewon, Pajangan, Piyungan
9	Kebakaran	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
10	Banjir Lahar Dingin	Sepanjang aliran sungai Code, Gajahwong, Winongo, dan Opak Kalikuning

Sumber : BPBD, 2018

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana, yaitu "Mewujudkan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana" sehingga mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan termasuk mengantisipasi dampak bencana. Kejadian dan lokasi bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.31 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jenis Bencana					
		Tanah Longsor	Banjir	Kebakaran	Angin Kencang	Pohon Tumbang	Abrasi
1	Piyungan	72	0	10	5	4	0
2	Dlingo	73	0	3	5	1	0
3	Sewon	4	2	14	10	6	0
4	Bantul	0	1	16	7	9	0
5	Imogiri	79	0	5	3	6	0
6	Kasihan	24	3	10	4	10	0
7	Sanden	0	1	2	3	1	0
8	Sedayu	18	0	2	2	0	0
9	Srandakan	0	2	1	2	3	1
10	Jetis	1	1	8	5	6	0
11	Pleret	39	1	9	6	4	0
12	Bambanglipuro	1	2	1	5	4	0
13	Banguntapan	4	0	12	4	4	0

No	Kecamatan	Jenis Bencana					
		Tanah Longsor	Banjir	Kebakaran	Angin Kencang	Pohon Tumbang	Abrasi
14	Pandak	0	3	5	3	1	0
15	Pundong	15	1	6	3	3	0
16	Kretek	0	2	4	4	0	1
17	Pajangan	15	3	3	2	1	0
	Jumlah	345	22	111	73	63	2

Sumber: BPBD, 2018

Tahun 2017, terjadi bencana yang sangat hebat yang diakibatkan badai siklon tropis sempaka yang terjadi pada tanggal 28 Nopember 2017. Adapun bencana yang diakibatkan badai tropis sempaka ini adalah tanah longsor, angin kencang, dan banjir dengan jumlah kejadian 139 titik yang meliputi 17 kecamatan, 51 Desa. Atas kejadian bencana tersebut Bupati Bantul mengeluarkan SK tanggap darurat sebagai wujud penanggulangan bencana dengan Anggaran Belanja Tak Terduga yang dibagi 2 tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.1.257.135.000,00 dan tahap kedua sebesar Rp.1.041.600.000,00. Rincian setiap kejadian sebagai berikut :

1. Angin kencang yang ditandai dengan pohon tumbang terjadi di 48 titik meliputi 14 Kecamatan 30 Desa
2. Tanah Longsor terjadi di 43 titik meliputi 10 Kecamatan 38 Desa
3. Banjir terjadi di 43 titik meliputi 12 Kecamatan 29 Desa
4. Rumah Roboh terjadi di 4 titik meliputi 2 Kecamatan 3 Desa
5. Erosi di 1 titik meliputi Kecamatan Kretek Desa Trimulyo
6. Gelombang Pasang terjadi di 1 titik meliputi Kecamatan Srandakan Desa Poncosari di sekitar pantai Kwaru

Pengungsian pada kejadian bencana tersebut ada sebanyak 3488 jiwa tersebar di 4 lokasi yang terdiri dari Difabel : 1 Jiwa, Lansia : 249 jiwa, Dewasa : 344 Jiwa, Anak-anak : 135 Jiwa, Balita : 217 Jiwa, Bumil : 5 Jiwa.

Tindakan yang dilakukan :

- a. Menerjunkan seluruh personil SATGAS BPBD dibantu relawan melakukan penanganan.
- b. Evakuasi warga ke tempat balai dusun, balai desa, rumah warga, dan tempat tinggi (Jetis, Imogiri, Pleret, Pandak)
- c. Penanganan Prioritas Akses Jalan dan Rumah bersama warga, FPRB, Relawan
- d. Koordinasi dengan lembaga dan komunitas terkait
- e. Aktivasi Status Tanggap Darurat

- f. Membentuk Pos Terpadu di BPBD Bantul dan pos Pantau di wilayah rawan banjir longor, dan angin kencang



Gambar III.35 Tindakan Evakuasi Korban Bencana

Permasalahan :

1. Jumlah pembentukan desa tangguh bencana melalui APBD I tidak dapat dipastikan setiap tahunnya
2. Dalam mewujudkan Kabupaten Tangguh bencana perlu percepatan penambahan jumlah pembentukan desa tangguh bencana
3. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya;
4. Belum tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai untuk upaya komprehensif dalam penanggulangan bencana, baik upaya rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah.
5. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
6. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan berkesinambungan
7. Masih minimnya pemahaman sebagian masyarakat dan stakeholder terhadap upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bantul.
8. Beragamnya potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Bantul

9. Belum adanya kurikulum pengurangan risiko bencana yang menjadi pedoman bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Bantul.
10. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di BPBD Kabupaten Bantul
11. Jumlah desa dan sekolah di Kabupaten Bantul yang cukup banyak
12. Kurangnya sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan sungai serta togor EWS

Solusi :

1. Penambahan jumlah pembentukan desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana melalui APBD I maupun APBD II
2. Pembentukan desa tangguh bencana melalui APBD II setiap tahunnya perlu ditambah dari 2 desa ke 4 atau 5 desa.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.
4. Pengarusutamaan mitigasi bencana yang menjadi program prioritas dalam pengurangan resiko bencana.
5. Integrasi/ pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam RPJMD di Kabupaten Bantul yang didukung oleh seluruh OPD di Kabupaten Bantul
6. Penetapan kurikulum pendidikan yang berbasis Mitigasi/ Pengurangan risiko bencana
7. Peningkatan jumlah personil BPBD dan Fasilitator Masyarakat untuk mendukung program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Sekolah Siaga Bencana (SSB).
8. Penambahan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan sungai serta togor EWS

Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum, kecuali dengan standar konstruksi tahan gempa dan rutin dilakukan pendidikan mitigasi bencana;

- b. Pada daerah-daerah wilayah rawan bencana, dibentuk desa tangguh bencana, sekolah siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.
- c. Selain itu juga upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, yaitu penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara dan togor EWS di sepanjang pantai serta peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya :

1. Pengembangan edukasi kebencanaan
2. Efisiensi anggaran APBD II dalam setiap pembentukan desa tangguh bencana
3. Pengajuan setiap tahun kepada BPBD provinsi untuk pembentukan destana melalui APBD I
4. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai aktor utama penanggulangan bencana dan dunia usaha dalam upaya penanggulangan bencana, memberi pelayanan yang optimal mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait mantapnya penanggulangan bencana. Pada tahun 2017, sebanyak 2 (dua) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, terdiri dari :

1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
2. Program pengendalian banjir

13. Sasaran Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Lahan

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Bantul saat ini adalah meningkatnya alih fungsi lahan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bantul merupakan bagian pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang mendorong masuknya kegiatan investasi di berbagai sektor.

Tabel III.32 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Lahan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	70,12	81	70,24	86,72	85	82,64

Sumber : Bappeda, 2018

Sasaran terwujudnya kesesuaian pemanfaatan lahan tercapai Tinggi. Hal ini dilihat dari indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang tercapai 70,24% dari target 81% atau nilai capaian sebesar 86,72%. Capaian ini menyumbangkan 82,64% dari target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu persentase kesesuaian lahan sebesar 85%.

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya terhadap penggunaan lahan eksisting, dapat ditentukan "kategori" kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Bantul. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan kriteria 'sesuai' pada kawasan lindung seluas 4.711,26 Ha atau 69,13%, pada kawasan budidaya seluas 30.890,67 Ha atau 71,49%; sehingga luas total sebesar 35.601,93 Ha atau 70,24% dari luas Kabupaten Bantul; selengkapnya sebagai berikut :

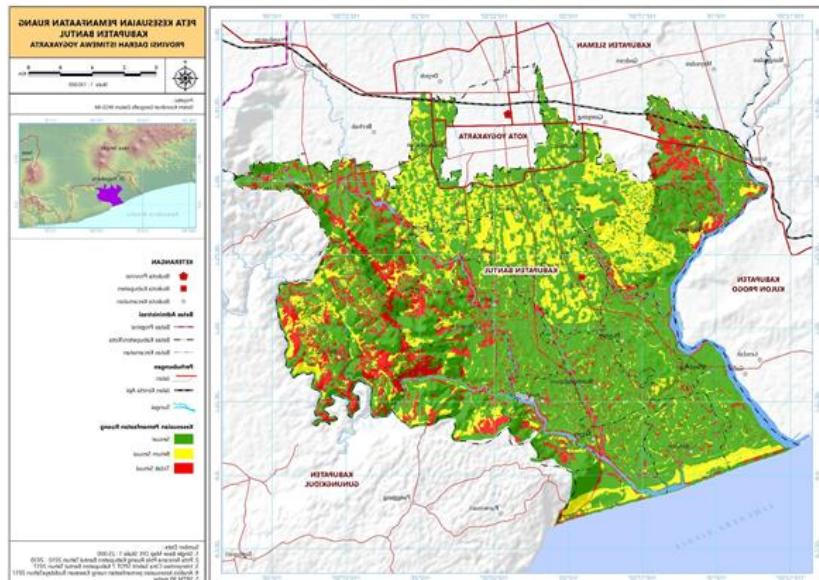
Tabel III.33 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul

FUNGSI KAWASAN		Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai	
LINDUNG	Kawasan Hutan Lindung	432,07	143,75	695,16	1.270,98
	Kawasan Resapan Air	2.229,23	-	410,50	2.639,73
	Sempadan Pantai	187,33	-	67,09	254,42
	Sempadan Sungai	1.716,23	-	657,94	2.374,17
	Kawasan Cagar Budaya	146,40	20,14	109,10	275,64
	Jumlah Lindung (Ha)	4.711,26	163,89	1.939,79	6.814,94
	% terhadap Kawasan Lindung	69,14	2,40	28,46	100,00
	% terhadap Kabupaten Bantul	9,30	0,32	3,83	13,45
BUDIDAYA	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	9.636,33	925,58	374,09	10.936,00
	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	6.995,12	5.192,26	8,37	12.195,75

FUNGSI KAWASAN	Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)
	Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai	
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	319,38	480,63	379,51	1.179,52
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	8.283,30	655,30	1.727,59	10.666,19
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	3.657,76	2,15	1.125,39	4.785,30
Kawasan Peruntukan Industri	1.775,00	-	688,75	2.463,75
Kawasan Peruntukan Pariwisata	223,77	759,19	-	982,96
Jumlah Budidaya (Ha)	30.890,67	8.015,10	4.303,69	43.209,46
% terhadap Kawasan Budidaya	71,49	18,55	9,96	100,00
% terhadap Kabupaten Bantul	60,95	15,81	8,49	85,25
TOTAL (Ha)	35.601,93	8.178,99	6.243,75	50.024,40*
% terhadap Kabupaten Bantul	70,24	16,14	12,32	98,70
Kategori	Tinggi	Rendah	Rendah	

Sumber : Bappeda, 2018

Berdasarkan nilai atau persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Bantul masuk dalam kriteria "sesuai" dapat ditentukan "kategori" kesesuaian pemanfaatan ruang Tinggi, diartikan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rujukan rencana tata ruang (termasuk indikasi program).



Gambar III.36 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2017

Permasalahan :

1. Upaya perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang sering terkendala masalah kepemilikan lahan, dimana Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam mengatur penggunaan lahan yang dimiliki masyarakat maupun Badan Usaha
2. Terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung
3. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya secara umum berada pada kriteria 'belum sesuai/belum terwujud'

Solusi :

1. Untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan pengaturan penggunaan lahan melalui rencana tata ruang yang lebih detail (RDTRK), aturan zonasi, aturan perijinan, penerapan sanksi, insentif, dan desinsentif penggunaan lahan.
2. Pengembangan aturan konsolidasi lahan dan sistem ganti untung lahan dalam upaya alih fungsi pemanfaatan lahan.
3. Pemerintah Kabupaten perlu melengkapi aturan serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara intensif.
4. Pembuatan sistem informasi pengawasan (surveillance) dan monitoring evaluasi penggunaan lahan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Penertiban dan penataan permukiman yang berada di sempadan sungai dan sempadan pantai.
6. Penyusunan aturan penggunaan lahan dan pembangunan pada kawasan resapan air, sempadan sungai, dan sempadan pantai.
7. Penegakan aturan dan hukum melalui kegiatan penindakan dan penuntutan.
8. Diperlukan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan sehingga perwujudan ruang nantinya dapat sesuai dengan rencana pola ruang.
9. Penetapan lokasi LP2B sebagai upaya ketahanan pangan dan pengendalian penggunaan lahan pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah.
10. Pengembangan insentif bagi kawasan pertanian melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.

11. Penyusunan aturan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukan permukiman baik di perkotaan dan perdesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukungnya.

Strategi untuk pencapaian indikator kedepan antara lain :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholder* dalam peningkatan keterwujudan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bantul.
2. Melaksanakan pengawasan dengan menggunakan aplikasi teknologi kamera (*drone*) yang terhubungkan dengan data *base map*, sehingga lebih valid dan meminimalisir *human error*.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Lahan. Pada tahun 2017, sebanyak 3 (tiga) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, terdiri dari :

1. Program perencanaan tata ruang
2. Program pengendalian pemanfaatan ruang
3. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

14. Sasaran Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tenram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Keadaan ini diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul. Pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel III.34 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Angka kriminalitas	0,061	0,038	0,074	5,26	0,027	-74,07

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018

Sasaran terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat tercapai Sangat Rendah. Hal ini dilihat dari indikator angka kriminalitas yang tercapai 0,074% dari target 0,038% atau nilai capaian sebesar 5,26%. Capaian ini menyumbangkan -74,07% dari target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu angka kriminalitas sebesar 0,027%.

Angka kriminalitas adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel III.35 Angka Kriminalitas Tahun 2017

No	Jenis Kriminal	2017
1	Jumlah kasus narkoba	46
2	Jumlah kasus pembunuhan	0
3	Jumlah kejahatan seksual	29
4	Jumlah kasus penganiayaan	135
5	Jumlah kasus pencurian	395
6	Jumlah kasus penipuan	76
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	2
Total kasus		683
Jumlah penduduk		927.181
Angka kriminalitas		0,074

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018

Kasus Pencurian merupakan kasus terbanyak di tahun 2017, sedangkan kasus yang tidak terjadi adalah pembunuhan. Meningkatnya angka kriminalitas secara signifikan dibanding tahun 2016 dikarenakan oleh beberapa faktor yang tidak dapat diabaikan :

1. Faktor Ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang menurun dibanding tahun lalu, serta kesenjangan ekonomi yang semakin lebar menjadikan kondisi ekonomi masyarakat Bantul semakin sulit, hal ini membawa dampak munculnya aksi nekat pencurian dan penipuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kasus pencurian meningkat dari tahun 2016 sebanyak 345 kasus menjadi 395 kasus di tahun 2017, sedangkan kasus penipuan turun dari tahun 2016 sebanyak 88 kasus menjadi 76 kasus ditahun 2017. Selain hal tersebut, keinginan untuk memperoleh kekayaan secara instan memunculkan adanya kasus pemalsuan uang sebanyak 2 kasus.
2. Faktor Sosial, perkembangan teknologi dan informasi saat ini membawa dampak sosial pada kehidupan masyarakat. Meningkatnya kejahatan seksual dari tahun 2016 sebanyak 4 kasus menjadi 29 di tahun 2017, salah satunya disebabkan banyaknya beredarnya gambar / film porno yang dengan mudah diterima melalui telepon selular. Demikian juga dengan kasus narkoba, perubahan gaya hidup anak muda saat ini, jika tidak dapat dikontrol akan membawa ke arah pergaulan yang salah dan terjerat pada penggunaan narkoba maupun minuman keras. Kasus klith merupakan salah satu kasus yang masuk dalam kategori penganiayaan. Kasus penganiayaan ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 81 kasus, menjadi 135 kasus.
3. Kurang maksimalnya sanksi hukum bagi pelaku kriminalitas, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku



Gambar III.37 Persiapan Pelaksanaan Operasi Gabungan

Solusi dilakukan untuk meminimalisir tindak kriminal diantaranya :

1. Memberdayakan dan meningkatkan peran anggota Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan Linmas di wilayah mempunyai peran yang penting, saat ini jumlah angota Linmas sebanyak 5.001 orang. Jumlah ini diharapkan akan terus bertambah memenuhi rasio Linmas dengan RT. Jumlah tersebut sudah mencapai 95,3 % dari jumlah RT sebanyak 5.775.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kasus yang terjadi.
3. Mengoptimalkan peran PPNS yang ada untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengarah pada tindak kriminal

Strategi yang diterapkan dalam upaya pencapaian indikator adalah :

1. Revitalisasi terhadap paradigma ketentraman dan ketertiban umum disemua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa.
2. Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.
3. Komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Hukum dan Peraturan Daerah

4. Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di semua tingkatan pemerintahan terhadap urgensi upaya penegakan Hukum dan Peraturan Daera

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. Pada tahun 2017, sebanyak 13 (tiga belas) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, terdiri dari :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3. Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan
4. Program Penegakan Perda
5. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
6. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
7. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
8. Program peningkatan peran serta kepemudaan
9. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
10. Program pengembangan wawasan kebangsaan
11. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
12. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)
13. Program Penegakan Perda dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)

15. Sasaran Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah

Semenjak penerapan UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, urusan kebudayaan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan signifikan. Posisi kebudayaan menjadi semakin kuat karena kebudayaan menjadi payung atau pengarusutamaan pembangunan di segala bidang. Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Dalam bidang kebudayaan, misi pemerintah Kabupaten Bantul adalah meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Tabel III.36 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,80	50	57,01	114,02	90	63,34

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2018

Sasaran terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah tercapai Sangat Tinggi. Hal ini dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan yang tercapai 57,01 dari target 50 atau nilai capaian sebesar 114,02%. Capaian ini menyumbangkan 63,34% dari target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu sebesar 90.

Angka IPK dihitung dengan melakukan survey di masyarakat. Kementerian Pendidikan Nasional menggunakan angaka gotong royong dan indeks toleransi untuk mengukur capaian sasaran strategis yang tiap tahunnya disyaratkan minimal tercapai 0,55 (indeks gotong royong) dan 0,49 (indeks toleransi) selama tahun 2015 – 2019 (sumber: Rakor Pusat dan Daerah Dirjen Kebudayaan tanggal 16 April 2015) Pengukuran IPK Kabupaten Bantul juga menggunakan kedua indeks tersebut untuk penghitungan.

Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Bantul dihitung berdasar rerata indeks toleransi, indeks gotong royong dan indeks rasa aman. Perhitungan Nilai IPK dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2017

Indeks	Nilai I
Indeks Toleransi	57,62
Indeks Gotong Royong	57,20
Indeks Rasa Aman	55,19
Indek Pembangunan Kebudayaan	57,01

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2018

Maraknya event seni budaya bisa dilihat dari semakin banyaknya event budaya yang dilaksanakan seperti festival, karnaval, gelar budaya, pasar rakyat dan event-event lainnya baik yang bertaraf lokal, nasional maupun internasional. Menarik untuk dicermati bahwa berbagai event ini diselenggarakan baik oleh swasta, masyarakat maupun pemerintah.

Event budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul meliputi Pentas Kesenian dan Budaya Daerah sebanyak 488 pentas di sepanjang tahun 2017, antara lain: Wayang, Ketoprak, Jathilan, Reog, Pentas Seni Religi, Hadroh dan lain-lain. Melalui kegiatan-kegiatan ini kesenian dan budaya daerah mendapatkan ruang untuk mengaktualisasikan eksistensinya kepada masyarakat, dan kelompok seni maupun tradisi yang tersebar di Kabupaten Bantul juga mendapatkan kesempatan untuk tampil di tengah-tengah masayakat



Gambar III.38 Tradisi membagi Lemper Raksasa dalam Rebo Pungkas

Terdapat 235 (dua ratus tiga puluh lima) Warisan Budaya Cagar Budaya (WBCB) di Kabupaten Bantul, 21,7% atau 51 diantaranya telah ditetapkan menjadi Cagar Budaya. Warisan Budaya Benda Cagar Budaya (Tangible) dapat berupa benda, bangunan, struktur bangunan maupun situs. Sebelum mendapatkan penilaian atau kajian oleh TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) untuk ditetapkan menjadi Cagar Budaya, sebutan peninggalan/warisan budaya benda sebagaimana tersebut di atas adalah Warisan Budaya.

Penetapan Warisan Budaya menjadi Cagar Budaya oleh TACB mempetimbangkan hal-hal antara lain: karena keberadaannya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, sehingga perlu upaya pelestarian, dan dilestarikan melalui proses penetapan.

Pada Tahun 2016 Cagar Budaya di Kabupaten Bantul berjumlah 26, melalui kegiatan Pelestarian Warisan Budaya Cagar Budaya (DANAIS) pada tahun 2017 sejumlah 25 Warisan Budaya telah dikaji oleh TACB dan ditetapkan menjadi Cagar Budaya melalui SK Bupati Bantul Nomor 416 Tahun 2017.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu destinasi wisata penting di DIY, khususnya jenis wisata budaya maka penyelenggaraan urusan kebudayaan diarahkan untuk melestarikan kebudayaan daerah melalui kebijakan yang berlandaskan prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aset seni budaya masyarakat, warisan budaya, dan Cagar Budaya (CB) guna menunjang predikat sebagai destinasi wisata budaya. Kawasan strategis pengembangan kawasan budaya Kabupaten Bantul diarahkan di beberapa kawasan sebagai berikut:

- a. Kawasan Kotagede Banguntapan;
- b. Kawasan Imogiri;
- c. Kawasan Pleret;
- d. Kawasan Goa Selarong Pajangan;
- e. Kawasan Ambar Binangun Kasihan;
- f. Kawasan Masjid Pathok Negoro Kasihan;
- g. Kawasan Parangtritis Kretek;
- h. Kawasan Mangir Pajangan;
- i. Kawasan Makam Sewu Pandak;
- j. Kawasan Cagar Budaya Pendidikan.

Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dengan terbentuknya kelompok-kelompok kesenian dan budaya dari tingkat pedukuhan dan desa. Kelompok tersebut banyak yang aktif secara swadaya berlatih sendiri, dan Pemerintah memberikan fasilitasi dengan menyediakan tempat bagi kelompok-kelompok seni ini untuk melakukan pentas atau mengekspresikan.

Bantul juga turut berprestasi dalam ajang parade maupun festival dalam kancah provinsi dan nasional, diantaranya adalah pada ajang Parade Teater Tradisi Tingkat Nasional sebagai Penyaji Unggulan I/Terbaik, Festival Dalang Cilik Tingkat Nasional

sebagai Penampil Terbaik. Sedangkan di tingkat provinsi sebagai Juara Umum pada ajang Festival Ketoprak, Juara 1 pada Festival Dalang Anak, Juara 1 pada Festival Teater, Juara II pada Festival Langen Carito, Juara III pada Festival Karawitan, Juara III pada Festival Sendratari dan Juara III pada Festival Upacara Adat.

Permasalahan :

- a. Belum optimalnya pengelolaan aset seni budaya, warisan budaya, dan cagar budaya.
- b. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian aset seni budaya, warisan budaya, dan cagar budaya belum optimal.
- c. Kegiatan perlindungan terhadap aset seni budaya, warisan budaya, dan cagar budaya belum optimal.

Solusi :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM serta kelembagaan pengelola urusan kebudayaan.
- b. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian aset seni budaya, warisan budaya, dan cagar budaya.
- c. Penyusunan regulasi tingkat kabupaten terkait peraturan perundangan perlindungan aset seni budaya, warisan budaya, dan cagar budaya.

Strategi kedepan membangun kelembagaan yang lebih profesional dan mumpuni untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah. Pada tahun 2017, sebanyak 2 (dua) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, terdiri dari :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

C. Akuntabilitas Anggaran

APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2017 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp.2.095.073.460.546,68 dan belanja sebesar Rp.2.084.562.728.354,22 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.235.622.037.392,54 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Bantul TA 2017 untuk pendapatan sebesar Rp.2.086.739.683.071,45 realisasi belanja Rp.1.839.161.109.207,60 terdapat surplus pembiayaan Rp.397.802.016,00 sehingga terdapat Silpa Rp.247.508.007.061,39.

Rencana pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut :

Tabel III.38 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017*

Uraian		Jumlah TA 2016		Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
A	Pendapatan	2.095.073.460.546,68	2.086.739.683.071,45	(8.333.777.475,23)	99,60
	Pendapatan asli daerah	458.042.255.770,19	494.039.761.972,97	35.997.506.202,78	107,86
	Pendapatan Transfer	1.628.151.082.518,49	1.582.101.156.370,48	(46.049.926.148,01)	91,17
	Lain-lain pendapatan yang sah	8.880.122.258,00	10.598.764.728,00	1.718.642.470,00	119,35
B	Belanja	2.084.562.728.354,22	1.839.161.109.207,60	(245.401.619.146,62)	88,23
	Belanja operasi	1.692.182.527.316,80	1.504.413.765.736,46	(187.768.761.580,34)	88,90
	Belanja modal	358.060.931.911,00	332.626.017.914,14	(25.434.913.996,86)	92,90
	Belanja tak terduga	34.319.269.126,42	2.121.325.557,00	(32.197.943.569,42)	6,18
C	Transfer	246.132.769.585,00	237.090.406.211,00	(9.042.363.374,00)	96,33
	Transfer bagi hasil pendapatan	14.330.194.685,00	14.330.194.685,00	0	100,00
	Transfer bantuan keuangan	231.802.574.900,00	222.760.211.526,00	(9.042.363.374,00)	96,10
	Surplus/(defisit)	(235.622.037.392,54)	10.488.167.652,85	246.110.205.045,39	(4,45)
D	Pembiayaan				
	Penerimaan daerah	261.482.037.392,54	261.384.639.408,54	(97.397.984,00)	99,96
	Pengeluaran daerah	25.860.000.000,00	24.364.800.000,00	(1.495.200.000,00)	94,22
	Pembiayaan Netto	235.622.037.392,54	237.019.839.408,54	1.397.802.016,00	100,59
	Selisih lebih pembiayaan	0,00	247.508.007.061,39	247.508.007.061,39	0

Uraian	Jumlah TA 2016		Bertambah/(Berkurang)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
anggaran tahun berkenaan				

Sumber : BKAD, 2018

* : unaudited

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.084.562.728.354,22 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut :

Tabel III.39 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tak Langsung	1.040.066.007.942,42	50,11
2	Belanja Langsung	1.044.496.720.411,80	49,89
	Jumlah	2.084.562.728.354,22	100,00

Sumber : BKAD, 2018

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.40 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	76.048.731.395,00	7,28
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	327.332.266.677,80	31,34
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	153.046.001.200,00	14,65
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	28.998.528.800,00	2,78
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	13.057.029.920,00	1,25
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	13.274.792.500,00	1,27

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	7.994.603.000,00	0,77
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	16.842.129.416,00	1,61
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	4.525.837.500,00	0,43
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	203.760.223.821,00	19,51
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	9.511.018.700,00	0,91
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	14.343.948.905,00	1,37
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	6.521.275.000,00	0,62
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	10.409.508.500,00	1,00
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	11.717.000.000,00	1,12
Jumlah		897.372.895.334,80	85,81
Anggaran Langsung Pendukung		147.123.825.077,00	14,09
Total Belanja Langsung		1.044.496.720.411,80	100,00

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, BKAD, 2018, data diolah

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.897.372.895.334,80 atau sebesar 85,81% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.147.123.825.077,00 atau sebesar 14,09% dari total belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan besaran anggaran 31,34% dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relative besar adalah sasaran Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat, yaitu sebesar 19,51%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat sebesar 0,43% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 91,87%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 91,98%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91,23%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 99,89%. Anggaran pada IKU ini efektif mendukung akuntabilitas kinerja. Sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 33,70%, atau kurang efektif dalam mendukung akuntabilitas kinerja.

Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah menyerap anggaran paling besar yaitu 99,89% dari target. Anggaran pada sasaran ini efektif mewujudkan akuntabilitas kinerja. Sedangkan sasaran Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang menyerap anggaran terkecil yaitu 33,70% dari target, atau kurang efektif dalam mendukung akuntabilitas kinerja.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel III.41 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	65	75	115,38	76.048.731.395,00	66.062.832.591,00	86,87
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,28	73,47*	100,26	327.322.266.677,80	296.216.887.709,49	90,50
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	15,2	14,73*	96,91	153.046.001.200,00	147.317.984.852,00	96,26
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	13,66	14,07**	97,00	28.998.528.800,00	27.938.059.255,00	96,34
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,3	4,52	85,28	9.253.613.920,00	8.388.253.754,66	90,65
		Pemerataan Pendapatan	0,3121	0,4126	67,80	3.803.416.000,00	3.313.336.190,00	87,11
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	6	32,51	541,83	13.274.792.500,00	12.774.683.242,00	96,23
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	30	41,11	133,33	7.994.603.000,00	6.948.812.703,66	86,92

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	0,6	20,52	3.420,00	2.311.573.416,00	2.237.220.050,00	96,78
		Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1010	0,1133	112,18	1.137.565.000,00	1.112.167.750,00	97,77
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	1,025	36,974	3.607,22	11.492.487.000,00	9.705.118.827,00	84,45
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,15	0,166	110,67	1.900.504.000,00	1.804.073.299,37	94,93
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,30	5,92	455,38	4.525.837.500,00	4.120.502.819,00	91,04
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	72	71,57	99,40	203.760.223.821,00	192.109.718.210,84	94,28
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	45	45,1	100,22	9.511.018.700,00	8.627.784.928,91	90,71
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	22,66	29,33	129,45	14.343.948.905,00	13.284.370.287,67	92,61
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Percentase kesesuaian pemanfaatan ruang	81	70,42	86,94	6.521.275.000,00	2.197.728.467,00	33,70
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,038	0,074	5,26	10.409.508.500,00	9.529.475.125,00	91,55

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50	57,01	114,02	11.717.000.000,00	11.704.068.950,00	99,89
Jumlah						897.372.895.334,80	825.393.079.012,60	91,98
Belanja langsung pendukung						147.123.825.077,00	134.214.393.187,00	91,23
Total belanja Langsung						1.044.496.720.411,80	959.607.472.199,60	91,87

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, 2018, Badan Keuangan dan Aset Daerah, data diolah

Sedangkan berdasarkan distribusi realisasi masing-masing IKU disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.42 Distribusi Realisasi Anggaran Pendukung IKU Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (Rp)	% Distribusi
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	66.062.832.591,00	6,88
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	296.216.887.709,49	30,87
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	147.317.984.852,00	15,35
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	27.938.059.255,00	2,91
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	8.388.253.754,66	0,87
		Pemerataan Pendapatan	3.313.336.190,00	0,35
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	12.774.683.242,00	1,33
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	6.948.812.703,66	0,72
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	2.237.220.050,00	0,23
		Pertumbuhan produksi tanaman pangan	1.112.167.750,00	0,12
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	9.705.118.827,00	1,01
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	1.804.073.299,37	0,19
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	4.120.502.819,00	0,43
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	192.109.718.210,84	20,02
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	8.627.784.928,91	0,90
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	13.284.370.287,67	1,38
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	2.197.728.467,00	0,23

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (Rp)	% Distribusi
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	9.529.475.125,00	0,99
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	11.704.068.950,00	1,22
Jumlah		959.607.472.199,60		100

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, BKAD, 2018, data diolah

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 8,13%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 8,02%, Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada sasaran Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 66,30%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Pembangunan Kebudayaan pada sasaran Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah sebesar 0,11%.

Efisiensi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.43 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran		Efisiensi Anggaran	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rp.	%
1	Indonesia Governance Index (IGI)	76.048.731.395,00	66.062.832.591,00	9.985.898.804,00	13,13
2	Umur Harapan Hidup	327.322.266.677,80	296.216.887.709,49	31.105.378.968,31	9,50
3	Angka Harapan Lama sekolah	153.046.001.200,00	147.317.984.852,00	5.728.016.348,00	3,74
4	Angka Kemiskinan	28.998.528.800,00	27.938.059.255,00	1.060.469.545,00	3,66
5	Pertumbuhan ekonomi	9.253.613.920,00	8.388.253.754,66	865.360.165,34	9,35
6	Pemerataan Pendapatan	3.803.416.000,00	3.313.336.190,00	490.079.810,00	12,89
7	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	13.274.792.500,00	12.774.683.242,00	500.109.258,00	3,77
8	Cakupan Industri Kreatif	7.994.603.000,00	6.948.812.703,66	1.045.790.296,34	13,08

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran		Efisiensi Anggaran	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rp.	%
9	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	2.311.573.416,00	2.237.220.050,00	74.353.366,00	3,22
10	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	1.137.565.000,00	1.112.167.750,00	25.397.250,00	2,23
11	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	11.492.487.000,00	9.705.118.827,00	1.787.368.173,00	15,55
12	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	1.900.504.000,00	1.804.073.299,37	96.430.700,63	5,07
13	Pertumbuhan produksi perikanan	4.525.837.500,00	4.120.502.819,00		
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	203.760.223.821,00	192.109.718.210,84	11.650.505.610,16	5,72
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	9.511.018.700,00	8.627.784.928,91	883.233.771,09	9,29
16	Desa Tangguh Bencana	14.343.948.905,00	13.284.370.287,67	1.059.578.617,33	7,39
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	6.521.275.000,00	2.197.728.467,00	4.323.546.533,00	66,30
18	Angka Kriminalitas	10.409.508.500,00	9.529.475.125,00	880.033.375,00	8,45
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	11.717.000.000,00	11.704.068.950,00	12.931.050,00	0,11
Jumlah		897.372.895.334,80	825.393.079.012,60	71.979.816.322,20	8,02
Belanja Langsung pendukung		147.123.825.077,00	134.214.393.187,00	12.909.431.890,00	8,77
Total Belanja Langsung		1.044.496.720.411,80	959.607.472.199,60	84.889.248.212,20	8,13

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, BKAD, 2018, data diolah

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2017, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 15 (lima belas) sasaran strategis, 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 19 indikator kinerja utama Bupati tahun 2017, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator sasaran atau sebanyak 78,95% dalam kriteria Sangat Tinggi, bahkan 12 (dua belas) IKU diantaranya realisasi mencapai lebih dari 100%. Sedangkan 2 (dua) IKU atau 10,53% masuk dalam kriteria Tinggi, 1 (satu) IKU atau 5,26% masuk dalam kriteria Sedang. dan 1 (satu) IKU atau 5,26% masuk dalam kriteria Sangat Rendah. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Lampiran I

Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Bantul Tahun 2017

1. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Kabupaten Bantul, Predikat "BB" atas prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Peringkat 7 (tujuh) atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sekaligus menerima Pasaramsya Purnakarya Nugraha;
4. Penghargaan Kabupaten Sehat (Swasti Saba) Tingkat Wistara Tahun 2017 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
5. Kabupaten Layak Anak mendapatkan penghargaan tingkat Madya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Sertifikat Adipura Pemerintah Kabupaten Bantul oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Penghargaan sebagai kabupaten paling aktif untuk input data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
9. Penghargaan LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi;

Lampiran II

Struktur Pemerintah Kabupaten Bantul

